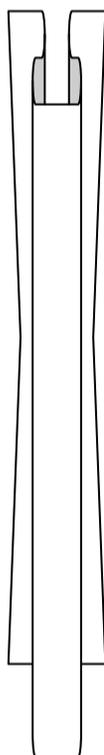




# **RENCANA KERJA (RENJA)**

**SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2015**



**Alamat : Jl. Bukit Hibul Utara No.1 Nanga Bulik 74662**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karuniaNYA penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja SEKRETARIAT DAERAH Tahun 2015 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari 10 (sepuluh) bagian yang ada di lingkup Sekretariat Daerah. Usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SEKRETARIAT DAERAH sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Perda Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau dan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja SEKRETARIAT DAERAH Tahun 2015 ini, harapan kami apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah (SEKRETARIAT DAERAH) Kabupaten Lamandau dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2015.

Nanga Bulik, Juni 2014

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Lamandau,

**Drs. ARIFIN L.P. UMBING, M.A.P**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19581226 198001 1 001

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD.....	7
2.2. Analisis Pelayanan Kinerja SKPD .....	20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	26
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	31
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	40
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	41
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	41
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	41
3.3. Program dan Kegiatan.....	44
BAB IV PENUTUP .....	49

## DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD.....	9
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah .....	25

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan untuk terlaksananya kualitas pelayanan publik yang baik.

Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan bahan pengolahan data dan informasi serta menganalisa gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu sesuai Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPd. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip penyusunan rancangan Renja SKPD adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lamandau dan RENSTRA SKPD (2013 – 2018) serta mengacu pada rancangan awal RKPd;

- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
- c. Penyusunan Renja SKPD adalah rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD dan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  7. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

- Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 517);
  13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15);
  14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 18 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 30 seri D) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau Tahun 2013–2018 (Lembaran Daerah Kab. Lamandau Tahun 2014 Nomor 122 seri E);
20. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Perubahan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor 295).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau adalah :

1. Mendeskripsikan program – program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau;
2. Pelaksanaan program–program tersebut sesuai dengan yang diharapkan melalui fokus pada program - program prioritas.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

#### **BAB IV PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau selama tahun 2013 dan perkiraan target tahun 2014. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

##### A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

## B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

### **Evaluasi Program Tahun 2013**

Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2013 Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau dengan APBD (murni) sebesar Rp. 42.615.990.290,- dan anggaran perubahan sebesar Rp. 43.505.558.615,- yang terdiri dari 21 program dan 121 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 38.246.817.092,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 95,96 % dan capaian kinerja keuangan sebesar 88,17 %.

Tabel 2.1

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RKPD  
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI KEUANGAN APBD-P 2013 (Rp)	REALISASI FISIK APBD-P 2013 (%)
				RKPD TAHUN 2013	APBD-P TAHUN 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SEKRETARIAT DAERAH			<u>42.615.990.290</u>	<u>43.505.558.615</u>	<u>38.246.817.092</u>	<u>88,17</u>
	I. BELANJA TIDAK LANGSUNG			<u>5.712.092.750</u>	<u>5.712.092.750</u>	<u>5.042.641.555</u>	<u>88,28</u>
	II. BELANJA LANGSUNG PEGAWAI			<u>36.903.897.540</u>	<u>37.778.465.865</u>	<u>33.204.175.537</u>	<u>88,06</u>
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kemampuan Sekretariat Daerah dalam koordinasi dan fasilitasi	100%	9.448.168.620	9.964.188.620	9.522.951.858	
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan akan surat menyurat	100%	50.000.000	42.000.000	37.650.000	
-	Penyediaan Biaya Telepon dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan listrik dan telepon Sekretariat daerah Kab. Lamandau	100%	525.287.620	533.287.620	449.524.231	
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan operasional kendaraan dinas Sekretariat daerah Kab. Lamandau	100%	26.250.000	26.250.000	23.500.000	
-	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tertibnya administrasi keuangan Sekretariat daerah Kab. Lamandau	100%	1.251.687.620	1.122.100.000	958.991.400	

-	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya Kantor Sekretariat daerah Kab. Lamandau yang asri dan bersih	100%	300.000.000	300.000.000	259.088.200	
-	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya peralatan alat tulis kantor Sekretariat daerah Kab. Lamandau	100%	225.000.000	225.000.000	221.365.092	
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan akan percetakan dan penggandaan	100%	165.000.000	165.000.000	150.433.400	
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik dan penerangan kantor Sekretariat daerah Kab. Lamandau	100%	30.000.000	30.000.000	29.315.000	
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	1.453.581.000	1.710.081.000	1.545.771.300	
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya peralatan rumah tangga	100%	45.000.000	70.750.000	69.381.500	
-	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan/minum aparatur Sekretariat daerah Kab. Lamandau	100%	590.000.000	689.570.000	601.912.000	
-	Rapat-rapat Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya kebutuhan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah aparatur Sekretariat daerah Kab. Lamandau	100%	1.430.000.000	1.680.000.000	1.679.942.164	
-	Rapat-rapat Konsultasi ke Dalam Daerah	Tersedianya kebutuhan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah aparatur Sekretariat daerah Kab. Lamandau	100%	725.000.000	725.000.000	539.822.500	
-	Penyediaan Operasional Unit layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Tersedianya operasional ULP	100%	1.400.000.000	1.400.000.000	1.155.098.000	
-	Rapat-rapat Konsultasi ke Luar Negeri	Tersedianya kebutuhan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke Luar negeri aparatur Sekretariat daerah Kab. Lamandau	100 %	150.000.000	100.000.000	0	
-	Penyediaan Operasional LPSE	Tersedianya Operasional LPSE	100 %	1.081.650.000	1.145.150.000	1.001.957.471	
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya kemampuan Sekretariat daerah dalam koordinasi dan fasilitasi</b>	100%	<b>12.027.785.000</b>	<b>12.602.438.200</b>	<b>11.678.704.058</b>	
-	Pengadaan Mobil Jenasah	Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana dan sarana kerja Sekretariat daerah Kab. Lamandau	100 %	300.000.000	250.000.000	192.804.000	

-	Pemeliharaan rutin rumah dinas	Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana dan sarana kerja Sekretariat daerah Kab. Lamandau	100%	23.750.000	23.750.000	23.482.800	
-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor Sekretariat daerah Kab. Lamandau	100%	150.875.000	280.875.000	259.618.250	
-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Kend.Dinas Sekretariat daerah Kab. Lamandau	100%	656.120.000	686.940.000	658.548.058	
-	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100 %	500.000.000	500.000.000	495.855.000	
-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Setda Kabupaten Lamandau	100%	81.000.000	81.000.000	80.653.000	
-	Rehab Sedang/Berat Kend Dinas	Terpeliharanya Kend.Dinas Sekretariat daerah Kab. Lamandau	100%	390.000.000	485.000.000	412.512.200	
-	Penyediaan Lampu Taman dan Jalan	Tersedianya penerangan yang memadai	100%	75.000.000	92.873.000	91.342.000	
-	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan dinas/operasional	100%	3.750.000.000	3.530.000.000	3.366.718.000	
-	Pengukuran /Sertifikasi Tanah Pemda	Tersertifikasi tanah milik pemda	100%	220.000.000	220.000.000	0	
-	Pemeliharaan Rutin/berkala listrik kantor	Terpeliharanya Listrik kantor	100%	230.000.000	230.000.000	213.371.500	
-	Pembebasan Tanah dan Kebun untuk fasilitas Pemda	Tersedianya Tanah dan Kebun untuk fasilitas Pemda	100%	164.040.000	500.000.000	383.0115.000	
-	Pengadaan Peralatan Rumah Dinas	Tersedianya peralatan rumah dinas	100%	1.200.000.000	1.200.000.000	1.171.498.000	
-	Pembuatan Sumur Bor	Tersedianya sumur Bor	100%	100.000.000	100.000.000	0	
-	Pembuatan Kerangka Baliho	Tersedianya Kerangka Baliho	100%	150.000.000	150.000.000	148.700.000	
-	Pengadaan Perlatan Rumah Tangga LPSE	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga LPSE	100%	142.000.000	161.000.000	153.000.000	
-	Peningkatan Jalan Lingkungan Rujab Bupati	Kelayakan Jalan Rujab Bupati	100%	500.000.000	500.000.000	480.179.400	
-	Lanjutan Penataan Lingkungan GPU	Kelayakan Lingkungan GPU	100%	1.000.000.000	1.000.000.000	998.000.000	
-	Pembangunan Kelengkapan Sarana Prasarana Kantor	Tersedianya Kelengkapan Sarana Prasarana Kantor	100%	50.000.000	50.000.000	49.690.000	
-	Penataan Halaman Kantor KPU	Tertatanya Halaman Kantor KPU	100%	250.000.000	250.000.000	239.650.000	

-	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan GPU	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan GPU	100%	845.000.000	845.000.000	820.666.000	
-	Rehab Sumur	Terehabnya Sumur	100%	30.000.000	30.000.000	26.545.850	
-	Pembuatan Gudang Mesin Genset	Tersedianya Gudang Mesin Genset	100%	100.000.000	100.000.000	99.390.000	
-	Rehab Mess Pemda	Kelayakan Mess Pemda	100%	200.000.000	200.000.000	190.400.000	
-	Penataan Halaman dan Taman Rujab Bupati	Layaknya Halaman dan Taman rujab Bupati	100%	350.000.000	350.000.000	349.000.000	
-	Pembuatan Sekat Ruang Setda	Tertatanya Ruang Setda	100%	200.000.000	200.000.000	198.800.000	
-	Pengadaan AC Mess Desa	Tersedianya AC Mess Desa	100%	350.000.000	336.000.000	335.665.000	
-	Pemasangan Keramik Aula KPU	Layaknya Aula KPU	100 %	250.000.000	250.000.000	239.600.000	
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur Sekretariat daerah Kab. Lamandau</b>	<b>100%</b>	<b>168.500.000</b>	<b>168.500.000</b>	<b>163.440.000</b>	
-	Pengadaan Pakaian Dinas serta kelengkapannya	Adanya keseragaman pakaian olah raga aparatur Sekretariat daerah Kab. Lamandau	100%	168.500.000	168.500.000	163.440.000	
<b>4.</b>	<b>Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS</b>	<b>Terlaksananya fasilitas pindah dan purna tugas PNS</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>43.400.000</b>	
-	Pemulangan Pegawai yg tewas dalam melaksanakan tugas	Tersedianyaa dana pemulangan pegawai yg tewas dalam tugas	100%	50.000.000	50.000.000	43.400.000	
<b>5.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Peningkatan SDM aparatur dalam pelayanan pembangunan Kabupaten Lamandau</b>	<b>100%</b>	<b>1.425.380.000</b>	<b>1.380.380.000</b>	<b>915.762.000</b>	
-	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya SDM yang berkualitas di lingkungan Sekretariat daerah Kab. Lamandau	100%	160.000.000	160.000.000	118.253.900	
-	Raker Camat,Kades/Lurah Ketua BPD	Terlaksananya kegiatan raker Camat,Kades/Lurah Ketua BPD	100%	200.000.000	200.000.000	198.135.500	

-	Pelatihan Administrasi Desa	Terlaksana pelatihan Administrasi Desa	100%	95.000.000	95.000.000	89.910.700
-	Pelaksanaan tugas dan fungsi peneliti dan pengawas Pemilihan Kades	Terlaksananya tugas dan penelitian Pilkades	100%	40.000.000	40.000.000	34.245.000
-	Tim Fasilitasi ADD	Terlaksananya fasilitasi ADD	100%	46.000.000	46.000.000	34.030.000
-	Studi Banding Camat, Kades dan Lurah	Terlaksananya Studi Banding Camat, Kades dan Lurah	100%	300.000.000	255.000.000	235.424.900
-	Studi Banding Damang dan Sekretaris Damang	Terlaksananya Studi Banding Damang dan Sekretaris Damang	100%	200.000.000	200.000.000	183.216.000
-	Pelatihan dan Sosialisasi LPSE	Terlaksananya Pelatihan dan Sosialisasi LPSE	100%	384.380.000	384.380.000	22.546.000
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>Terlaksananya Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>
-	Penyelenggaraan Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten	Terseleenggaranya Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten	100%	50.000.000	50.000.000	0
<b>7.</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH /WKDH</b>	<b>Terlaksananya pelayanan kedinasan KDH/WKH</b>	<b>100%</b>	<b>1.890.000.000</b>	<b>1.740.000.000</b>	<b>1.147.660.349</b>
-	Dialog audienesi dengan tokoh masy,dll	Terlaksananya dialog dgn masyarakat	100%	150.000.000	150.000.000	91.519.500
-	Penerimaan kunker pejabat negara/dept/	Terlaksananya penerimaan kunker pejabat	100%	300.000.000	300.000.000	100.475.000

	- Rapat Koordinasi Pejabat Pemda	Terlaksananya Rakor Pejabat Pemda	100%	50.000.000	50.000.000	17.495.000	
	- Kunker /Inspeksi KDH/WKDH	Terlaksananya kunker KDH/WKDH	100%	660.000.000	560.000.000	349.003.000	
	- Koordinasi dengan Pem Pusat dan Pemda Lainnya	Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintahan Pusat dan Pemda lainnya	100%	600.000.000	550.000.000	549.367.849	
	- Rapat Koordinasi Unsur Muspida	Terlaksananya Rakor Unsur Muspida	-	130.000.000	130.000.000	39.800.000	
<b>8.</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Setda</b>	<b>100%</b>	<b>373.358.920</b>	<b>416.413.920</b>	<b>324.692.200</b>	
	- Penatausahaan Keu dilingk Setda	Terlaksananya penatalaksanaan Keuangan Setda	100%	150.608.920	194.527.320	161.359.600	
	- Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah/Setda	Terlaksananya manajemen aset Setda	100%	110.000.000	110.000.000	99.658.000	
	- Penyusunan anggaran dilingk Setda	Tersedianya dokumen penyusunan anggaran Setda	100%	112.750.000	111.886.600	63.674.600	
<b>9</b>	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>100%</b>	<b>275.000.000</b>	<b>275.000.000</b>	<b>257.528.850</b>	
	- Pendampingan Portal Informasi Berbasis WEB	Tersedianya Portal Informasi Berbasis WEB	100%	275.000.000	275.000.000	257.528.850	
<b>10.</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundangan</b>	<b>Terkendalinya dan terpantaunya pelaksanaan pembangunan bidang Peraturan dan Perundangan</b>	<b>100%</b>	<b>671.000.000</b>	<b>644.000.000</b>	<b>631.239.000</b>	

	- Pembuatan Perda dan Perkada	Tersusunnya perda dan perkada	100%	190.000.000	135.000.000	186.168.600	
	- Sosialisasi Perda kab.Lamandau	Tersosialisasikannya perda kab.Lamandau	100%	296.000.000	269.000.000	267.625.000	
	- Prolegda(legislasi daerah)	Adanya sistem dan program legislasi daerah	100%	45.000.000	45.000.000	37.536.250	
	- Penyuluhan Hukum Terpadu	Adanya pembinaan hukum kepada masyarakat	100%	140.000.000	140.000.000	139.909.150	
<b>11.</b>	<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>	<b>Adanya sinkronisasi kebijakan dan peraturan dalam pembangunan daerah otonomi baru</b>	<b>100%</b>	<b>220.960.000</b>	<b>240.960.000</b>	<b>203.040.900</b>	
	- Fasilitasi Percepatan Penyelesaian tapal batas wilayah antar daerah	Adanya koordinasi kegiatan pembangunan bidang pemerintahan	100%	65.000.000	65.000.000	61.395.900	
	- Penyusunan LPPD	Tersusunnya LPPD Kab.Lamandau	100%	25.000.000	45.000.000	43.380.000	
	- Tata Batas Antar Desa dan Kecamatan	Adanya kegiatan Koordinasi Tata Batas Desa dan Kecamatan	100%	35.000.000	35.000.000	15.665.000	
	- Tim Fasilitasi Rupa Bumi	Terlaksananya kegiatan fasilitasi rupa bumi	100%	65.000.000	65.000.000	56.140.000	
	- Tim Fasilitasi Pembebasan Tanah Pemda	Terlaksananya fasilitasi pembebasan lahan pemda	100%	30.960.000	30.960.000	26.460.000	
<b>12.</b>	<b>Program pembangunan informasi</b>	<b>Adanya informasi dan Publikasi hasil pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>3.460.750.000</b>	<b>3.683.810.000</b>	<b>3.626.061.810</b>	
	- Publikasi dan Informasi kegiatan pembangunan	Adanya peningkatan dan kesadaran aparatur pemerintah dan peran serta masyarakat dalam memacu pembangunan Kabupaten Lamandau	100%	520.000.000	429.060.000	423.128.500	
	- Kerjasama dengan media cetak/elektronik	Terjadi kerjasama yang lebih erat dengan media cetak dan elektronik	100%	2.375.000.000	2.748.000.000	2.739.298.600	
	- Sistem Pelayanan Informasi Pengaduan	Tersedianya sistem pengaduan masyarakat	100%	74.000.000	44.000.000	40.480.000	
	- Kliping Koran	Tersusunnya Kliping koran reguler	100%	40.000.000	40.000.000	24.003.000	

	- Buletin Bahaum Bakuba	Tersusunnya Bulte in Bahaum Bakuba regular	100%	182.500.000	167.500.000	167.007.500	
	- Biaya Operasional RSPD	Tersedianya biaya operasional RSPD	100%	155.000.000	138.476.000	137.971.210	
	- Pendampingan/Peliputan Kunjungan KDH	Terliputnya kunjungan KDH/WKDH	100%	79.250.000	79.250.000	70.473.000	
	- Pembangunan SDM Editing	Terlatihnya SDM Editing	100%	35.000.000	0	0	
	- Biaya Operasional TVRI	Tersedianya Biaya Operasional TVRI	100%	0	37.524.000	23.700.000	
<b>13</b>	<b>Program Dokumentasi Hukum dan Peta Permasalahan Hukum</b>	<b>Terlaksananya Dokumentasi Hukum dan Peta Permasalahan Hukum</b>	<b>100%</b>	<b>295.000.000</b>	<b>322.000.000</b>	<b>228.548.850</b>	
	- Bantuan Hukum, Sengketa Hukum dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Terlaksananya Bantuan Hukum, Sengketa Hukum dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	100%	230.000.000	257.000.000	168.946.250	
	- Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum	Terlaksananya Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum	100%	65.000.000	65.000.000	59.638.600	
<b>14.</b>	<b>Program peningkatan sarana perekonomian</b>	<b>Adanya peningkatan sarana ekonomi bagi masy miskin</b>	<b>100%</b>	<b>600.000.000</b>	<b>695.035.125</b>	<b>629.053.000</b>	
	- Pendistribusian Monitoring dan Evaluasi Program	Adanya monitoring dan evaluasi distribusi beras raskin	100%	600.000.000	695.035.125	629.053.000	
<b>15.</b>	<b>Program Pemb Dunia usaha dan Pemberdayaan ekonomi masyarakat</b>	<b>Adanya peningkatan perekonomian masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>85.000.000</b>	<b>85.000.000</b>	<b>79.936.200</b>	
	- Peningkatan Pengetahuan Masy dalam rangka peningkatan perekonomian masy	Meningkatnya minat dunia usaha dan UMKM	100%	85.000.000	85.000.000	79.936.200	
<b>16.</b>	<b>Program Sosialisasi dan Pembinaan Hukum</b>	<b>Tersosialisasinya hukum di masy</b>	<b>100%</b>	<b>155.000.000</b>	<b>257.185.000</b>	<b>225.231.125</b>	
	- Lomba Kadarkum 2012	Terlaksananya lomba kadarkum 2012	100%	85.000.000	85.000.000	82.043.625	
	- Ranham Tahun 2012	Terlaksananya Ranham Tahun 2012	100%	70.000.000	70.000.000	68.255.000	

	- Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi	100%	0	102.185.000	74.932.500	
<b>17.</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi</b>	<b>Meningkatnya SDM Aparatur dan Perangkat Kelembagaannya</b>	<b>100%</b>	<b>879.370.000</b>	<b>879.370.000</b>	<b>92.623.720</b>	
	- Penyusunan LAKIP Setda	Tersusunnya LAKIP Setda	100%	9.370.000	9.370.000	9.258.000	
	- Fasilitasi LHKPN	Terfasilitasinya LHKPN	100%	50.000.000	50.000.000	48.081.600	
	- Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Tertatanya perangkat kelembagaan daerah	100%	100.000.000	100.000.000	109.671.000	
	- Pembuatan Profil kelembagaan dan Good Governan Dinas	Tersusunnya Profil kelembagaan dan Good Governan Dinas	100%	50.000.000	50.000.000	48.428.000	
	- Penyusunan Analisa Jabatan	Tersusunnya Analisa Jabatan	100%	480.000.000	480.000.000	423.008.990	
	- Pendampingan Penyusunan SOP	Tersedianya Pendampingan Penyusunan SOP	100%	190.000.000	190.000.000	179.567.400	
<b>18.</b>	<b>Program Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan</b>	<b>Meningkatnya pemantauan hasil pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>350.580.000</b>	<b>420.540.000</b>	<b>364.527.070</b>	
	- Penyusunan data informasi serta laporan pembangunan dilingk Setda	Tersusunnya laporan hasil pembangunan	100%	100.000.000	100.000.000	97.648.000	
	- Penetapan Kinerja serta Program dan Kegiatan Setda	Tercapainya indikator kinerja program kerja Setda	100%	40.000.000	40.000.000	38.876.500	
	- Inventarisasi dan Identifikasi Kegiatan Pembangunan	Tersusunnya dokumen kegiatan pembangunan	100%	100.000.000	100.000.000	80.317.250	
	- Pembinaan Desa Binaan dan PM2L	Terlaksananya Pembinaan Desa Binaan dan PM2L	100%	50.000.000	121.780.000	117.951.570	
	- Monitoring dan Evaluasi PPSP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PPSP	100%	60.580.000	58.760.000	29.733.750	

<b>19. Program Bidang Keagamaan</b>	<b>Meningkatnya ketaqwaan kepada Tuhan YME</b>	<b>100%</b>	<b>709.915.000</b>	<b>671.795.000</b>		
- Bimb./Penyuluhan Remaja Mesjid	Terlaksananya penyuluhan kepada Remaja Mesjid	100%	55.000.000	40.950.000	40.900.000	
- Bimb. Keluarga sakinah	Terlaksananya kegiatan bimbingan keluarga sakinah	100%	55.000.000	38.040.000	38.040.000	
- Penyelenggaraan Safari Ramadhan	Terselenggaranya Safari Ramadhan	100%	89.450.000	106.695.000	89.350.000	
- Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji	Tersedianya Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji	100%	246.115.000	228.870.000	121.827.780	
- Penyelenggaraan Kunjungan Natal	Terselenggaranya Kunjungan Natal	100%	99.350.000	99.350.000	99.350.000	
- Pelatihan Wanita Bijak	Terlaksananya Pelatihan Wanita Bijak	100%	65.000.000	57.890.000	52.840.000	
- Dukungan Penyelenggaraan STQ	Tersedianya Dukungan Penyelenggaraan STQ	100%	100.000.000	100.000.000	89.250.000	
<b>20. Program Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Meningkatnya kesejahteraan masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>1.297.250.000</b>	<b>773.370.000</b>	<b>441.129.016</b>	
- Khitanan Masal bagi keluarga tidak mampu	Terlaksananya kegiatan Khitanan masal bagi keluarga tidak mampu	100%	60.000.000	60.000.000	30.350.000	
- Pembinaan Mental Spritual	Terlaksananya pembinaan mental spritual keagamaan	100%	55.000.000	41.040.000	38.895.000	
- Koordinasi dan Konsultasi bidang Kesra	Meningkat koordinasi kesra	100%	65.000.000	100.080.000	49.249.865	
- Pembebasan Lahan Masyarakat	Terlaksananya pembebasan lahan masyarakat	100%	500.000.000	0	0	
- Isbat Nikah untuk keluarga tidak mampu	Terselenggaranya Isbat Nikah untuk keluarga tidak mampu	100%	85.000.000	85.000.000	0	

	- Sertifikasi Tanah Masyarakat	Terlaksananya Sertifikasi Tanah Masyarakat	100%	332.250.000	332.250.000	223.208.080	
	- Pemeliharaan dan Operasional Mahasiswa	Terlaksananya Pemeliharaan dan Operasional Mahasiswa	100%	200.000.000	155.000.000	20.875.136	
<b>21.</b>	<b>Program dukungan pelaksanaan tugas KDH/WKDH</b>	<b>Tersedianya dukungan pelaksanaan tugas KDH/WKDH</b>	<b>100%</b>	<b>2.470.880.000</b>	<b>2.473.480.000</b>	<b>2.170.842.081</b>	
	- Pelayanan kerumahtanggaan KDH/WKDH	Tersedianya pelayanan kerumahtanggaan KDH/WKDH	100%	1.000.000.000	982.900.000	931.729.938	
	- Pengadaan barang inventaris KDH/WKDH	Tersedianya barang inventaris KDH/WKDH	100%	195.000.000	214.700.000	206.441.245	
	- Pemeliharaan Rujab dan barang inventaris KDH/WKDH	Terpeliharanya rujab dan barang inventaris KDH/WKDH	100%	185.000.000	185.000.000	184.774.300	
	- Pemeliharaan kendaran dinas /Jabatan KDH/WKDH	Terpeliharannya kendaraan dinas/jabatan KDH/WKDH	100%	140.880.000	140.880.000	140.664.988	
	- Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH	Terpeliharanya kesehatan KDH/WKDH	100%	240.000.000	350.000.000	113.497.098	
	- Pengadaan pakaian dinas KDH/WKDH	Tersedianya pakaian dinas KDH/WKDH	100%	350.000.000	100.000.000	96.765.000	
	- Penunjang Pelantikan KDH/WKDH	Tersedianya Penunjang Pelantikan KDH/WKDH	100%	500.000.000	500.000.000	496.989.512	

## Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2014

Sedangkan belanja langsung untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2014 dengan pagu sebesar Rp.47.863.408.471,- terurai ke dalam **23** program dan **113** kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal lebih baik dibandingkan dengan tahun 2013, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2014, dalam menjalankan kegiatannya, Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi :

a. Organisasi

Belum fokusnya kinerja utama yang dihadapi oleh SEKRETARIAT DAERAH sehingga kemungkinan dalam mengawal visi dan misi SEKRETARIAT DAERAH menjadi bias dan belum sinkronnya antara perencanaan dan penganggaran.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten Lamandau Sumber Daya Manusia (SDM) sudah cukup memadai namun yang menjadi kendala adalah kurangnya pegawai pelaksana sehingga tidak berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah aparatur yang ada.

c. Sarana Kerja dan Perlengkapan

Untuk sarana kerja dan perlengkapan sudah sangat mendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten Lamandau.

d. Anggaran

Terbatasnya anggaran sehingga masih banyak kegiatan yang tidak terakomodir.

e. Data Kinerja dan Koordinasi Antar SKPD

Belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang akurat dan koordinasi antar Bagian yang masih mengalami hambatan sehingga diperlukan peraturan yang tegas untuk mengatasi hal tersebut.

f. Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah

Belum selaras dan sinergisnya Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dengan LAKIP Sekretariat Daerah serta masih minimnya kemampuan dan pengetahuan aparatur dalam penyusunan LAKIP dan RENJA.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, ke depan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan SEKRETARIAT DAERAH melalui pendidikan kader, pendidikan fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai. Membangun sistem pengumpulan data kinerja dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh Bagian mengenai koordinasi yang tegas untuk menghasilkan perencanaan yang akurat demi terciptanya pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

## **2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD**

### **Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi**

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, perubahan bentuk Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau merupakan konsekwensi dari pelaksanaan asas desentralisasi perlu disikapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau khususnya dalam merumuskan kebijakan dalam pengembangan kapasitas organisasi perangkat daerah, pemerintahan, hukum, dan organisasi, humas, sosial, ekonomi, pembangunan, umum dan kepegawaian, keuangan serta perlengkapan sesuai dengan acuan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Perda Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau selanjutnya Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan

Kabupaten Lamandau terdiri dari :

**2.1. Sekretaris Daerah**

**2.2. Staf Ahli Bupati**

- a) Staf Ahli Bupati bidang Hukum dan Politik;
- b) Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi dan Keuangan;
- c) Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan;
- d) Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan dan SDM;
- e) Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan.

**2.3. Asisten Sekretaris Daerah :**

- 1) Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra
  - a. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan
    - Sub Bagian Pemerintahan Umum;
    - Sub Bagian Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa;
    - Sub Bagian Kependudukan dan Hubungan Kerjasama.
  - b. Kepala Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan
    - Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
    - Sub Bagian Bina Sosial dan Kemasyarakatan.
  - c. Kepala Bagian Hukum
    - Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
    - Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
    - Sub Bagian Bantuan Hukum.
- 2) Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
  - a. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
    - Sub Bagian Perekonomian;
    - Sub Bagian Sumber Daya Alam;
    - Sub Bagian Bina Produksi, Budidaya dan Promosi.
  - b. Kepala bagian Administrasi Pembangunan
    - Sub Bagian Bina Penyusunan Program;
    - Sub Bagian Pengkajian, Analisis dan Pelaporan;
    - Sub Bagian Pengendalian dan Pembangunan.
  - c. Kepala Bagian Humas
    - Sub Bagian Penyaringan Informasi dan Penyiaran;

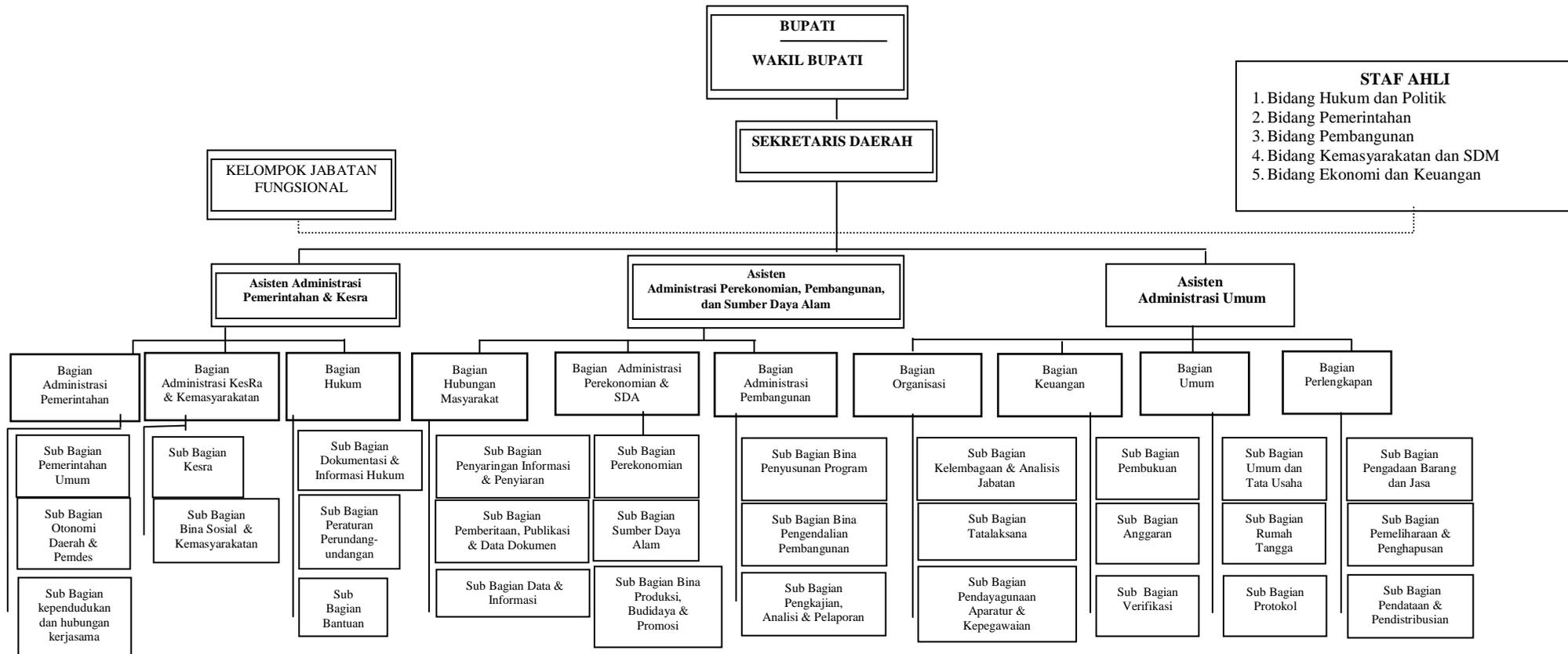
- Sub Bagian Pemberitaan dan Publikasi Data dan Dokumentasi;
  - Sub Bagian Data dan Informasi.
- 3) Asisten Administrasi Umum
- a. Kepala Bagian Organisasi
    - Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
    - Sub Bagian Tatalaksana;
    - Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian.
  - b. Kepala Bagian Keuangan
    - Sub Bagian Pembukuan;
    - Sub Bagian Anggaran;
    - Sub Bagian Verifikasi.
  - c. Kepala Bagian Umum
    - Sub Bagian Umum dan Tata Usaha;
    - Sub Bagian Rumah Tangga;
    - Sub Bagian Protokol.
  - d. Kepala Bagian Perlengkapan
    - Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
    - Sub Bagian Pemeliharaan dan Penghapusan;
    - Sub Bagian Pendataan dan Pendistribusian.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten Lamandau didukung oleh 99 (Sembilan Puluh Sembilan) orang Pegawai. Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka Pegawai Negeri Sipil SEKRETARIAT DAERAH terdiri dari 10 (sepuluh) orang berpendidikan Magister (S2), 39 (tiga puluh tujuh) orang berpendidikan Sarjana (S1), 2 (dua) orang Sarjana Muda, 42 (tiga puluh delapan) orang SLTA atau sederajat, 5 (lima) orang SLTP, dan 1 (satu) orang SD. Secara Struktural Jabatan/Eselonisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Jabatan Eselon II/a 1 (satu) orang, Eselon II/b 8 (delapan) orang Eselon III/a 10 (sepuluh) orang, Eselon IV/a sebanyak 21 (dua puluh satu) orang.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Perda Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau dan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, organisasi dan tata laksana, serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Koordinasi Staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- 2) Pembinaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
- 3) Pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah;
- 4) Koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok Pemerintah Kabupaten;
- 5) Melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
(Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2012)**



**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Sekretariat daerah**  
**Kabupaten Lamandau**

No	Indikator	SPM /Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Terlaksananya kebijakan keuangan secara selektif dan profesional dengan melaksanakan tertib administrasi keuangan secara konsisten		Penatausahaan Keuangan di lingkungan Setda										
			Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terkontrol.	100%	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 kali	2 Kali	2 Kali		
2.	Terciptanya sistem pengarsipan dan dokumentasi		Terlaksananya inventarisasi dan identifikasi hasil pembangunan										
			Tersedianya data dan informasi serta laporan pembangunan di Setda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
3.	Terciptanya database kepegawaian yang mampu memberikan akses informasi		Perencanaan Pembangunan Daerah										
			Tingkat penyampaian LAKIP Setda tepat waktu	100%	31 Maret 2013 (3 Bulan)	31 Maret 2014 (3 Bulan)	31 Maret 2015 (3 Bulan)	100%	100%	31 Maret 2014 (3 Bulan)	31 Maret 2015 (3 Bulan)		
			Tingkat ketepatan waktu penyampaian Kinerja Setda	100%	31 Maret 2013 (3 Bulan)	31 Maret 2014 (3 Bulan)	31 Maret 2015 (3 Bulan)	100%	100%	31 Maret 2014 (3 Bulan)	31 Maret 2015 (3 Bulan)		
			Penyampaian LHKPN Tepat Waktu	100%	31 Juni 2013	31 Juni 2014	31 Juni 2015	100%	100%	31 Juni 2014	31 Juni 2015		
			Penyampaian LPPD tepat waktu	100%	31 Maret 2013	31 Maret 2014	31 Maret 2015	100%	100%	31 Maret 2014	31 Maret 2015		

## **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

### **a. Isu Internal**

#### **1). Tugas Pokok dan Fungsi**

- Masih rendahnya kualitas layanan publik sehingga diperlukan inovasi-inovasi program pembangunan dengan melibatkan peran partisipatif masyarakat dan teknologi informasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi;
- Masih rendahnya pemanfaatan produk kajian hasil pembangunan yang dapat memberikan dampak besar bagi pembangunan di Kabupaten Lamandau dan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan;
- Kurangnya kerjasama internal dan eksternal (instansi vertikal) dalam pelaporan APBN/APBD;
- Masih adanya desa tertinggal serta lemahnya daya dukung dan kualitas SDM manajemen pemerintahan desa/kelurahan;
- Meningkatnya klaim lahan baik antar masyarakat, perusahaan dan tata batas daerah.

#### **2). Sumber Daya Manusia Aparatur**

- Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan kinerja.
- Kriteria kelayakan SDM yang sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan profesionalisme aparatur.
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan latar belakang profesionalisme/keahlian.

#### **3). Sarana dan Prasarana**

- Pengembangan Teknologi Informasi dan perangkat keras serta kelengkapannya dalam mendukung manajemen pembangunan yang lebih baik dan berkembang (e-government).
- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas penyediaan sarana pemerintah desa/kelurahan.

- Masih rendahnya penggunaan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan sumber energi dan air minum untuk masyarakat pedesaan.

#### **4). Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah**

Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu seoptimal mungkin membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kabupaten Lamandau menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan. Akibatnya tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarnya sehingga diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran agar dapat menampung semua aspirasi dan program yang ada.

### **b. Isu Eksternal**

#### **1). Meningkatnya Kerjasama Ekonomi Regional**

Seiring dengan masuknya era globalisme, pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan bahasa asing agar para aparatur memiliki daya saing tinggi untuk mengantisipasi masuknya perkembangan kerjasama ekonomi regional seperti AFTA-2020, ASEAN-2015, kerjasama APEC dan G-8.

#### **2). Kesadaran Global untuk Menjaga dan Memelihara Lingkungan**

Dampak pembangunan global yang sangat pesat mengakibatkan banyak pihak melupakan aspek pengelolaan lingkungan hidup, oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk lebih peduli terhadap kelestarian alam dan lingkungan hidup serta degradasi lingkungan melalui komitmen terhadap pencapaian target **Milenium Development Goals** dan Kerjasama Regional Pemprov Kalimantan Tengah dalam skema program RED ++

### 3). Peraturan Perundang-Undangan

Gerakan reformasi birokrasi telah mendorong dilaksanakannya berbagai perubahan-perubahan mendasar dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang berprinsip pada *good and clean governance* serta melibatkan partisipasi masyarakat, transparan, dan akuntabel. Dibutuhkan komitmen dari semua pemangku kepentingan, pemerintah, dan masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan *good governance* dan pembangunan dapat berlangsung secara optimal, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

#### Permasalahan

Berdasarkan Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list ke working plan*. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas. Hasil dari kegiatan Musrenbang baik dari tingkat desa hingga Kecamatan kadang kala tidak termuat di dalam Rencana Kerja yang disiapkan untuk menampung aspirasi masyarakat yang disebabkan karena keterbatasan dari dana Pemerintah sehingga dilakukan penundaan kegiatan atau mengesampingkan terlebih

dahulu diakibatkan kebutuhan lain yang lebih penting sehingga masyarakat merasa dikesampingkan.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau yang membantu Bupati Lamandau sebagai Koordinator Pembangunan Daerah agar semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas dan sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan manajemen pemerintahan yang bebas dari KKN di Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Kewirausahaan;
2. Penguatan Kapasitas Birokrasi dalam rangka Reformasi Birokrasi ;
3. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana yang masih belum optimal;
5. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
6. Lemahnya kapasitas kelembagaan di tingkat kelurahan/desa yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan;
7. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;

8. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
9. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan belum padunya dokumen-dokumen perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan;
10. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.
11. Ketidaksesuaian indikator-indikator yang ada didalam dokumen perencanaan sehingga mempengaruhi secara keseluruhan dari proses perencanaan pembangunan daerah itu sendiri.

### **Dampak**

Ketidaksesuaian dokumen perencanaan awal sangat berpengaruh terhadap hasil-hasil dokumen perencanaan pembangunan sehingga target yang dicanangkan Kepala Daerah pasti akan membias dan pada akhirnya akan mempengaruhi kepada hasil-hasil pembangunan yang diinginkan sejak awal oleh Kepala Daerah didalam visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga koordinasi dengan pihak terkait harus selalu dijalankan dan dikomunikasikan secara intensif dengan Kepala Daerah selaku pengambil kebijakan juga SKPD baik vertikal maupun otonom. Dibutuhkan konsistensi dalam perencanaan pembangunan sehingga alur-alur yang ditetapkan dapat sejalan dan teratur sesuai yang tertuang didalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah.

### **Tantangan dan Peluang**

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau harus menyiapkan dengan matang dan cermat segala kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan sehingga dikemudian hari apa yang menjadi produk yang dikeluarkan Sekretariat Daerah dapat dipertanggung

jawabkan. Hasil penyelenggaraan penelitian dan pengembangan aspek pemerintahan, pembangunan, sosial politik dan potensi ekonomi daerah dapat diterapkan secara bermanfaat.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2015 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut ini :

**Tabel 2.4.**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2015**  
**Kabupaten Lamandau**

**Nama SKPD : Sekretariat Daerah**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Kelancaran administrasi</b>	<b>100%</b>	<b>10.152.698.296</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Kelancaran administrasi</b>	<b>100%</b>	<b>10.152.698.296</b>	
	Penyediaan jasa surat menyurat	N.Bulik	Tersedianya kebutuhan surat menyurat	1 Tahun	52.500.000	Penyediaan jasa surat menyurat	N.Bulik	Tersedianya kebutuhan surat menyurat	1 Tahun	52.500.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	N.Bulik	Tersedianya biaya telpon, listrik kantor dan aula kantor	1 Tahun	556.805.983	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	N.Bulik	Tersedianya biaya telpon, listrik kantor dan aula kantor	1 Tahun	556.805.983	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	N.Bulik	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	16.800.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	N.Bulik	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	16.800.000	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	N.Bulik	Tersedianya jaminan jasa administrasi keuangan	1 Tahun	1.441.270.832	Penyediaan jasa administrasi keuangan	N.Bulik	Tersedianya jaminan jasa administrasi keuangan	1 Tahun	1.441.270.832	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	N.Bulik	Terpenuhinya pembayaran gaji petugas kebersihan	1 Tahun	378.000.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	N.Bulik	Terpenuhinya pembayaran gaji petugas kebersihan	1 Tahun	378.000.000	
	Penyediaan alat tulis kantor	N.Bulik	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	232.260.000	Penyediaan alat tulis kantor	N.Bulik	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	232.260.000	
	PPenyediaan barang cetakan dan penggandaan	N.Bulik	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	162.750.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	N.Bulik	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	162.750.000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	N.Bulik	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	1 Tahun	26.250.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	N.Bulik	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	1 Tahun	26.250.000	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	N.Bulik	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	1 Tahun	47.250.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	N.Bulik	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	1 Tahun	47.250.000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	N.Bulik	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	1 Tahun	1.765.296.227	Penyediaan peralatan rumah tangga	N.Bulik	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	1 Tahun	1.765.296.227	
	Penyediaan makanan dan minuman	N.Bulik	Tersedianya kebutuhan makan dan minum kantor	1 Tahun	697.200.000	Penyediaan makanan dan minuman	N.Bulik	Tersedianya kebutuhan makan dan minum kantor	1 Tahun	697.200.000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah	Adanya sinkronisasi	1 Tahun	1.470.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah	Adanya sinkronisasi	1 Tahun	1.470.000.000	
	Rapat-rapat koordinasi dan	Dalam	Adanya sinkronisasi	1 Tahun	666.750.000	Rapat-rapat koordinasi dan	Dalam Daerah	Adanya sinkronisasi	1 Tahun	666.750.000	

	konsultasi ke dalam daerah	Daerah				konsultasi ke dalam daerah					
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar negeri	Luar Negeri	Adanya sinkronisasi	1 Tahun	131.250.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar negeri	Luar negeri	Adanya sinkronisasi	1 Tahun	131.250.000	
	Penyediaan Operasional ULP	N.Bulik	Tersedianya operasional ULP	1 Tahun	1.315.398.000	Operasional ULP	N.Bulik	Tersedianya operasional ULP	1 Tahun	1.315.398.000	
	Pengelolaan LPSE	N.Bulik	Tersedianya operasional LPSE	1 Tahun	1.192.917.254	Operasional LPSE	N.Bulik	Tersedianya operasional LPSE	1 Tahun	1.192.917.254	
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Meningkatnya dukungan keberadaan sarana dan prasarana kerja</b>	<b>100%</b>	<b>9.676.859.000</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Meningkatnya dukungan keberadaan sarana dan prasarana kerja</b>	<b>100%</b>	<b>9.676.859.000</b>	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	N.Bulik	Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional	1 paket	3.000.000.000	Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional	N.Bulik	Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional	4 unit	3.000.000.000	
	Pemeliharaan rutin rumah dinas	N.Bulik	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas	1 Paket	19.950.000	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas	N.Bulik	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas	1 Paket	19.950.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	N.Bulik	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 Paket	152.500.000	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	N.Bulik	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 Paket	152.500.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	N.Bulik	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Roda 4	759.234.000	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	N.Bulik	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1 tahun	759.234.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	N.Bulik	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 paket	237.300.000	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	N.Bulik	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 tahun	237.300.000	
	Rehab Sedang/Berat Kend Dinas	N.Bulik	Terlaksananya rehab sedang kendaraan dinas	Roda 4	425.250.000	Terlaksananya rehab sedang kendaraan dinas	N.Bulik	Terlaksananya rehab sedang kendaraan dinas	1 Tahun	425.250.000	
	Rehab Sedang/Berat Gedung kantor	N.Bulik	Terlaksananya rehab sedang gedung kantor	Roda 4	200.000.000	Terlaksananya rehab sedang gedung kantor	N.Bulik	Terlaksananya rehab sedang gedung kantor	1 Tahun	200.000.000	
	Pembangunan Rujab Wakil Bupati Lamandau Tahap I	N.Bulik	Terlaksananya pembangunan rujab	1 paket	2.375.000.000	Terlaksananya pembangunan rujab	N.Bulik	Terlaksananya pembangunan rujab	1 unit	2.375.000.000	
	Pengembangan Aula Setda	N.Bulik	Terlaksananya Pengembangan Aula Setda	1 Paket	0	Terlaksananya Pengembangan Aula Setda	N.Bulik	Terlaksananya Pengembangan Aula Setda	1 unit	0	
	Pembebasan Lahan Untuk Pemda		Terlaksananya Pembebasan Lahan Untuk Pemda		1.500.000.000	Terlaksananya Pembebasan Lahan Untuk Pemda		Terlaksananya Pembebasan Lahan Untuk Pemda		1.500.000.000	
	Pembangunan Gedung TVRI	N.Bulik	Terlaksananya Pembangunan Gedung TVRI	1 tahun	0	Terlaksananya Pengukuran Tanah Pemda	N.Bulik	Terlaksananya Pengukuran Tanah Pemda	1 tahun	0	
	Pembangunan Parkir Tertutup SETDA	N.Bulik	Terlaksananya Pembangunan Parkir Tertutup SETDA	1 paket	600.000.000	Terlaksananya Pembangunan Parkir Tertutup SETDA	N.Bulik	Terlaksananya Pembangunan Parkir Tertutup SETDA	1 paket	600.000.000	
	Pembangunan Gedung Arsip/Dokumen Keuangan SETDA	N.Bulik	Terlaksananya Pembangunan Gedung Arsip/Dokumen Keuangan SETDA	1 paket	300.000.000	Terlaksananya Pembangunan Gedung Arsip/Dokumen Keuangan SETDA	N.Bulik	Terlaksananya Pembangunan Gedung Arsip/Dokumen Keuangan SETDA	1 paket	300.000.000	
	Pengadaan Karpet dan Ambal untuk PHBI	N.Bulik	Tersedianya Karpet dan Ambal untuk PHBI	1 paket	100.000.000	Tersedianya Karpet dan Ambal untuk PHBI	N.Bulik	Tersedianya Karpet dan Ambal untuk PHBI	1 unit	100.000.000	

	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>Meningkatnya disiplin dan kinerja</b>	<b>100%</b>	169.312.500	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>Meningkatnya disiplin dan kinerja</b>	<b>100%</b>	169.312.500	
	Pengadaan Pakaian Dinas serta kelengkapannya	N. Bulik	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas	1 Paket	169.312.500	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas	N. Bulik	Keseragaman pakaian dinas	1 paket	169.312.500	
	<b>Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS</b>		<b>Terlaksananya fasilitas pindah/purna tugas PNS</b>	<b>100%</b>	<b>42.000.000</b>	<b>Terlaksananya fasilitas pindah/purna tugas PNS</b>	<b>100%</b>	<b>Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS</b>	<b>100%</b>	<b>42.000.000</b>	
	Pemulangan Pegawai yg tewas dalam melaksanakan tugas	N. Bulik	Terlaksananya pemulangan pegawai yang tewas dalam tugas	1 Tahun	42.000.000	Terlaksananya pemulangan pegawai yang tewas dalam tugas	N. Bulik	Terlaksananya pemulangan pegawai yang tewas dalam tugas	1 Paket	42.000.000	
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Meningkatnya kapasitas Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>1.175.750.000</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>Meningkatnya kapasitas Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>1.175.750.000</b>	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	N. Bulik	Terlaksananya Diklat Formal	1 tahun	157.500.000	Terlaksananya Diklat Formal	N. Bulik	Terlaksananya Diklat Formal	1 tahun	157.500.000	
	Pelatihan Peningkatan Kemampuan Aparat Desa	N. Bulik	Terlaksananya Bimtek Anjab dan Analisa Beban Kerja	1 tahun	94.500.000	Terlaksananya Pelatihan	N. Bulik	Terlaksananya pelatihan	1 tahun	94.500.000	
	Raker Camat, Kades/Lurah Ketua BPD	N. Bulik	Terlaksananya Raker Camat	1 kl	210.000.000	Terlaksananya Raker Camat	N. Bulik	Terlaksananya Raker Camat	171 org	210.000.000	
	Pelatihan ADD	N. Bulik	Terlaksananya pelatihan ADD	1 Tahun	99.750.000	Terlaksananya pelatihan Administrasi Desa	N. Bulik	Terlaksananya pelatihan administrasi desa	91 org	99.750.000	
	Pelatihan dan Sosialisasi LPSE	Kab. Lamandau	Terlaksananya fasilitasi ADD	1 Tahun	105.000.000	Terlaksananya Pelatihan dan Sosialisasi LPSE	Kab. Lamandau	Terdidik dan terlatihnya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 Tahun	105.000.000	
	Studi Banding Camat, Kades, Lurah se-kabupaten Lamandau	Luar daerah	Terlaksananya studing banding	1 kl	254.500.000	Terlaksananya studing banding	Luar Daerah	Meningkatnya wawasan aparat desa	40 org	254.500.000	
	Studi Banding Damang dan Sekretaris Damang	Luar Daerah	Terlaksananya studi banding	1 kl	254.500.000	Terlaksananya studi banding	Luar Daerah	Meningkatnya wawasan damang	25 org	254.500.000	
	<b>Program Promosi dan Kerjasama Investasi</b>		<b>Meningkatnya investasi yang mendorong kesempatan dan penciptaan lapangan kerja serta lapangan usaha</b>	<b>100 %</b>	<b>73.500.000</b>	<b>Program Promosi dan Kerjasama Investasi</b>		<b>Persentase promosi investasi</b>	<b>100 %</b>	<b>73.500.000</b>	
	Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten		Terlaksananya Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten	1 kl	73.500.000		Kab. Lamandau	Tereksposnya hasil-hasil Daerah	1 kl	73.500.000	
	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH /WKDH</b>		<b>Meningkatnya pelayanan kedinasan KDH/WKDH</b>	<b>100%</b>	<b>1.958.617.500</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH /WKDH</b>	<b>100%</b>	<b>Meningkatnya pelayanan kedinasan KDH/WKDH</b>	<b>100%</b>	<b>1.958.617.500</b>	
	Dialog audinesi dengan tokoh masy, dll	Kab. Lamandau	Terlaksananya dialog audiensi dengan tokoh masyarakat	1 Tahun	157.500.000	Terlaksananya dialog audiensi dengan tokoh masyarakat	Kab. Lamandau	Terlaksananya dialog audiensi dengan tokoh masyarakat	1 Tahun	157.500.000	
	Penerimaan kunker pejabat negara/dept/	Kab. Lamandau	Terlaksananya penerimaan kunker pejabat negara	1 Tahun	315.000.000	Terlaksananya penerimaan kunker pejabat negara	Kab. Lamandau	Terlaksananya penerimaan kunker pejabat Negara	1 Tahun	315.000.000	
	Rapat Koordinasi Pejabat Pemda	N. Bulik	Terlaksananya Rakor pejabat	1 tahun	52.500.000	Terlaksananya Rakor pejabat	N. Bulik	Terlaksananya Rakor pejabat	1 tahun	52.500.000	

			pemda			pemda		pemda			
Kunker /Inspeksi KDH/WKDH	Kab. Lamandau	Terlaksananya kunker/inspeksi KDH/WKDH	1 Tahun	630.000.000	Terlaksananya kunker/inspeksi KDH/WKDH	Kab. Lamandau	Terlaksananya kunker/inspeksi KDH/WKDH	1 Tahun	630.000.000		
Koordinasi dengan Pem Pusat dan Pemda Lainnya	Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dengan pem pusat dan pemda lainnya	1 Tahun	630.000.000	Terlaksananya koordinasi dengan pem pusat dan pemda lainnya	Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dengan pem pusat dan pemda lainnya	1 Tahun	630.000.000		
Rapat Koordinasi Unsur Muspida	Nanga bulik	Terlaksananya rakor muspida	1 Tahun	173.617.500	Terlaksananya rakor muspida	Nanga bulik	Terlaksananya rakor muspida	1 Tahun	173.617.500		
<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>Terlaksananya penatausahaan keuangan dan manajemen aset setda</b>		<b>427.674.366</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Terlaksananya penatausahaan keuangan dan manajemen aset setda</b>	<b>100%</b>	<b>427.674.366</b>		
Penatausahaan Keu dilingk Setda	N. Bulik	Terlaksananya penatausahaan keuangan Setda	1 tahun	164.885.616	Terlaksananya penatausahaan keuangan Setda	N.Bulik	Terlaksananya penatausahaan keuangan Setda	1 tahun	164.885.616		
Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah/Setda	N.Bulik	Terlaksananya manajemen aset Setda	1 tahun	157.237.500	Terlaksananya manajemen aset Setda	N.Bulik	Terlaksananya manajemen aset Setda	1 tahun	157.237.500		
Penyusunan anggaran dilingk Setda	N. Bulik	Terlaksananya penyusunan anggaran Setda	1 tahun	105.551.250	Terlaksananya penyusunan anggaran Setda	N.Bulik	Terlaksananya penyusunan anggaran Setda	1 tahun	105.551.250		
<b>Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>		<b>Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat</b>		<b>574.875.000</b>	<b>Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	<b>100%</b>	<b>Terlaksananya Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	<b>100%</b>	<b>574.875.000</b>		
Pendampingan Portal Informasi Berbasis WEB		Terlaksananya Pendampingan Portal Informasi Berbasis WEB	1 Tahun	574.875.000	Terlaksananya Pendampingan Portal Informasi Berbasis WEB	N.Bulik	Terlaksananya Pendampingan Portal Informasi Berbasis WEB	N.Bulik	574.875.000		
<b>Program Penataan Peraturan Perundangan</b>		<b>Terlaksananya penataan peraturan perundangan</b>	<b>100%</b>	<b>672.000.000</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundangan</b>	<b>100%</b>	<b>Terlaksananya penataan peraturan perundangan</b>	<b>100%</b>	<b>672.000.000</b>		
Pembuatan Perda dan Perkada	N.Bulik	Terlaksananya pembuatan Perda dan Perkada	1 tahun	199.500.000	Terlaksananya pembuatan Perda dan Perkada	N. Bulik	Terlaksananya pembuatan Perda dan Perkada	1 tahun	199.500.000		
Sosialisasi Perda kab.Lamandau	N.Bulik	Terlaksananya sosialisasi Perda Kabupaten Lamandau	1 tahun	278.250.000	Terlaksananya sosialisasi Perda Kabupaten Lamandau	N. Bulik	Terlaksananya sosialisasi Perda Kabupaten Lamandau	1 tahun	278.250.000		
Prolegda (legislasi daerah)	N.Bulik	Terlaksananya Prolegda	1 tahun	47.250.000	Terlaksananya Prolegda	N. Bulik	Terlaksananya Prolegda	1 tahun	47.250.000		
Penyuluhan Hukum Terpadu	N.Bulik	Terlaksananya Penyuluhan Hukum Terpadu	1 tahun	147.000.000	Terlaksananya Penyuluhan Hukum Terpadu	N. Bulik	Terlaksananya Penyuluhan Hukum Terpadu	1 tahun	147.000.000		
<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>		<b>Terlaksananya penataan daerah otonomi baru</b>	<b>100%</b>	<b>486.108.000</b>	<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>	<b>100%</b>	<b>Terlaksananya penataan daerah otonomi baru</b>	<b>100%</b>	<b>486.108.000</b>		
Fasilitasi Percepatan Penyelesaian tapal batas wilayah antar daerah	Kab .Lamandau	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian tapal batas wilayah antar daerah	1 tahun	147.000.000	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian tapal batas wilayah antar daerah	Kab .Lamandau	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian tapal batas wilayah antar daerah	1 tahun	147.000.000		

	Penyusunan LPPD/ILPPD	N.Bulik	Terlaksananya penyusunan LPPD	1 buku	106.008.000	Terlaksananya penyusunan LPPD	N.Bulik	Terlaksananya penyusunan LPPD	1 buku	106.008.000	
	Tata Batas Antar Desa dan Kecamatan	N.Bulik	Terlaksananya koordinasi tata batas		58.800.000	Terlaksananya koordinasi tata batas	N.Bulik	Terlaksananya koordinasi tata batas	1 tahun	58.800.000	
	Tim Fasilitasi Rupa Bumi	N.Bulik	Terlaksananya fasilitasi rupa bumi	1 tahun	68.250.000	Terlaksananya fasilitasi rupa bumi	N.Bulik	Terlaksananya fasilitasi rupa bumi	1 tahun	68.250.000	
	Pelaksanaan Tugas dan fungsi peneliti dan pengawas pemilihan kepala desa	N.Bulik	Terlaksananya Pelaksanaan Tugas dan fungsi peneliti dan pengawas pemilihan kepala desa	1 tahun	57.750.000	Terlaksananya Pelaksanaan Tugas dan fungsi peneliti dan pengawas pemilihan kepala desa	N.Bulik	Terlaksananya Pelaksanaan Tugas dan fungsi peneliti dan pengawas pemilihan kepala desa	1 tahun	57.750.000	
	Tim Fasilitasi ADD	N.Bulik	Terbentuknya Tim Fasilitasi ADD	1 tahun	48.300.000	Terbentuknya Tim Fasilitasi ADD	N.Bulik	Terbentuknya Tim Fasilitasi ADD	1 tahun	48.300.000	
	<b>Program pembangunan informasi</b>		<b>Terjalinnnya kerjasama informasi</b>	<b>100%</b>	<b>4.483.994.550</b>	<b>Program pembangunan informasi</b>	<b>100%</b>	<b>Terjalinnnya kerjasama informasi</b>	<b>100%</b>	<b>4.483.994.550</b>	
	Publikasi dan Informasi kegiatan pembangunan	N.Bulik	Tersebar nya informasi pembangunan	1 tahun	546.000.000	Tersebar nya informasi pembangunan	N.Bulik	Tersebar nya informasi pembangunan	1 tahun	546.000.000	
	Kerjasama dengan media Cetak/elektronik	N.Bulik	Terjalinnnya kerjasama dengan media cetak/elektronik	1 tahun	3.223.290.000	Terjalinnnya kerjasama dengan media cetak/elektronik	N.Bulik	Terjalinnnya kerjasama dengan media cetak/elektronik	1 tahun	3.223.290.000	
	Kliping Koran	N.Bulik	Tersusun nya kliping Koran	1 tahun	42.000.000	Tersusun nya kliping koran	N.Bulik	Tersusun nya kliping Koran	1 tahun	42.000.000	
	Buletin Bahaum Bakuba	N.Bulik	Tersusun nya Buletin	1 tahun	191.625.000	Tersusun nya Buletin	N.Bulik	Tersusun nya Buletin	1 tahun	191.625.000	
	Pengelolaan RSPD	N.Bulik	Tersedianya operasional RSPD	1 tahun	173.649.000	Tersedianya operasional RSPD	N.Bulik	Tersedianya operasional RSPD	1 tahun	173.649.000	
	Sistem Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat	N.Bulik	Terlaksananya sistem Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat	1 tahun	98.226.450	Terlaksananya sistem Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat	N.Bulik	Terlaksananya sistem Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat	1 tahun	98.226.450	
	Biaya Operasional TVRI		Tersedianya operasional TVRI	1 tahun	125.991.000	Tersedianya operasional TVRI	N.Bulik	Tersedianya operasional TVRI	1 tahun	125.991.000	
	Pendampingan dan Peliputan Kunjungan Bupati Wakil Bupati	N.Bulik	Terlaksananya peliputan Kunjungan KDH /WKDH	1 tahun	83.212.500	Terlaksananya peliputan Kunjungan KDH /WKDH	N.Bulik	Terlaksananya peliputan Kunjungan KDH /WKDH	1 tahun	83.212.500	
	<b>Program Dokumentasi Hukum dan Peta Permasalahan Hukum</b>		<b>Terdokumentasinya hukum dan peta permasalahan hukum</b>	<b>100%</b>	<b>351.750.000</b>	<b>Terdokumentasinya hukum dan peta permasalahan hukum</b>	<b>100%</b>	<b>Terdokumentasinya hukum dan peta permasalahan hukum</b>	<b>100%</b>	<b>351.750.000</b>	
	Bantuan Hukum,sengketa hukum dan Penanganan Pengaduan masyarakat	N.Bulik	Tersedianya bantuan hukum dan penanganan pengaduan masyarakat	1 tahun	283.500.000	Tersedianya bantuan hukum dan penanganan pengaduan masyarakat	N.Bulik	Tersedianya bantuan hukum dan penanganan pengaduan masyarakat	1 tahun	283.500.000	
	Dokumentasi hukum dan informasi hukum dan pemetaan masalah hukum	N.Bulik	Terlaksananya dokumentasi hukum	1 tahun	68.250.000	Terlaksananya dokumentasi hukum	N.Bulik	Terlaksananya dokumentasi hukum	1 tahun	68.250.000	
	<b>Program peningkatan sarana perekonomian</b>		<b>Meningkatnya sarana perekonomian</b>	<b>100%</b>	<b>1.050.000.000</b>	<b>Program peningkatan sarana perekonomian</b>	<b>100%</b>	<b>Meningkatnya sarana perekonomian</b>	<b>100%</b>	<b>1.050.000.000</b>	

	Pendistribusian Monitoring dan Evaluasi Program	N.Bulik	Terlaksananya monev raskin kabupaten	1 tahun	1.050.000.000	Terlaksananya monev raskin kabupaten	N.Bulik	Terlaksananya monev raskin kabupaten	1 tahun	1.050.000.000	
	<b>Program Pemb Dunia usaha dan PEMBERDAYAAN ekonomi masyarakat</b>		<b>Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>89.250.000</b>	<b>Program Pemb Dunia usaha dan PEMBERDAYAAN ekonomi masyarakat</b>		<b>Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>89.250.000</b>	
	Peningkatan Pengetahuan Masy dalam rangka peningkatan perekonomian masy	N.Bulik	Terlaksananya upaya peningkatan perekonomian masyarakat	1 tahun	89.250.000	Terlaksananya upaya peningkatan perekonomian masyarakat	N.Bulik	Terlaksananya upaya peningkatan perekonomian masyarakat	1 tahun	89.250.000	
	<b>Program Sosialisasi dan Pembinaan Hukum</b>		<b>Meningkatnya pembinaan hukum</b>	<b>100%</b>	<b>430.500.000</b>	<b>Program Sosialisasi dan Pembinaan Hukum</b>	<b>100%</b>	<b>Meningkatnya pembinaan hukum</b>	<b>100%</b>	<b>430.500.000</b>	
	Lomba Kadarkum 2014	N.Bulik	Terlaksananya lomba Kadarkum	1 kl	84.000.000	Terlaksananya lomba Kadarkum	N.Bulik	Terlaksananya lomba Kadarkum	1kl	84.000.000	
	Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar hukum	N.Bulik	Terbentuknya desa /kelurahan sadar hukum	1 kl	105.000.000	Terbentuknya desa /kelurahan sadar hukum	N.Bulik	Terbentuknya desa /kelurahan sadar hokum	1 kl	105.000.000	
	Rencana Aksi Nasional HAM 2014	N.Bulik	Terlaksananya RANHAM 2013	1 kl	84.000.000	Terlaksananya RANHAM 2013	N.Bulik	Terlaksananya RANHAM 2013	1 kl	84.000.000	
	Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	N.Bulik	Terlaksananya RANHAM 2013	1 kl	157.500.000	Terlaksananya rencana aksi	N.Bulik	Terlaksananya Rencana aksi	1 kl	157.500.000	
	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi</b>		<b>Meningkatnya pembinaan dan Pengembangan Organisasi</b>	<b>100%</b>	<b>1.123.338.500</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi</b>	<b>100%</b>	<b>Meningkatnya pembinaan dan Pengembangan Organisasi</b>	<b>100%</b>	<b>1.123.338.500</b>	
	Penyusunan LAKIP Setda	N.Bulik	Tersusunnya LAKIP Setda	1 dok	9.838.500	Tersusunnya LAKIP Setda	N.Bulik	Tersusunnya LAKIP Setda	1 dok	9.838.500	
	Fasilitasi LHKPN	N.Bulik	Terlaksananya fasilitasi LHKPN	1 tahun	52.500.000	Terlaksananya fasilitasi LHKPN	N.Bulik	Terlaksananya fasilitasi LHKPN	1 tahun	52.500.000	
	Pembuatan profil kelembagaan	N.Bulik	Terlaksananya pembuatan profil kelembagaan	1 paket	52.500.000	Terlaksananya pembuatan profil kelembagaan	N.Bulik	Terlaksananya pembuatan profil kelembagaan	1 paket	52.500.000	
	Penyusunan Anjab dan ABK	N.Bulik	Tersusunnya Anjab dan ABK	1 tahun	504.000.000	Tersusunnya Anjab dan ABK	N.Bulik	Tersusunnya Anjab dan ABK	1 tahun	504.000.000	
	Penyusunan SOP	N.Bulik	Tersusunnya SOP	1 tahun	199.500.000	Tersusunnya SOP	N.Bulik	Tersusunnya SOP	1 tahun	199.500.000	
	Penyusunan Lakip Kabupaten/sosialisasi dan pendampingan BPKP	N.Bulik	Tersusunnya Lakip Kabupaten/Terlaksananya sosialisasi dan pendampingan BPKP	1 tahun	200.000.000	Tersusunnya Lakip Kabupaten/Terlaksananya sosialisasi dan pendampingan BPKP	N.Bulik	Tersusunnya Lakip Kabupaten/Terlaksananya sosialisasi dan pendampingan BPKP	1 kl	200.000.000	
	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	N.Bulik	Terlaksananya penataan kelembagaan Perangkat daerah	1 tahun	105.000.000	Terlaksananya penataan kelembagaan Perangkat daerah	N.Bulik	Terlaksananya penataan kelembagaan Perangkat daerah	1 tahun	105.000.000	
	<b>Program Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan</b>		<b>Terlaksananya pengembangan dan pemantauan pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>499.917.538</b>	<b>Program Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>Terlaksananya pengembangan dan pemantauan pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>499.917.538</b>	
	Penyusunan data informasi serta laporan pembangunan dilingk	N.Bulik	Terlaksananya penyusunan data informasi laporan pembangunan	1 tahun	105.000.000	Terlaksananya penyusunan data informasi laporan	N.Bulik	Terlaksananya penyusunan data informasi laporan pembangunan	1 tahun	105.000.000	

	Setda					pembangunan					
	Penetapan Kinerja serta Program dan Kegiatan Setda	N.Bulik	Terlaksananya penetapan indikator kinerja program/kegiatan Setda	1 tahun	74.000.000	Terlaksananya penetapan indikator kinerja program/kegiatan Setda	N.Bulik	Terlaksananya penetapan indikator kinerja program/kegiatan Setda	1 tahun	74.000.000	
	Inventarisasi dan Identifikasi Kegiatan Pembangunan	N.Bulik	Terlaksananya inventarisasi dan identifikasi hasil pembangunan	1 tahun	105.000.000	Terlaksananya inventarisasi dan identifikasi hasil pembangunan	N.Bulik	Terlaksananya inventarisasi dan identifikasi hasil pembangunan	1 tahun	105.000.000	
	Pembinaan Desa Binaan dan PM2L	N.Bulik	Terlaksananya monev desa binaan dan PM2L	1 tahun	52.500.000	Terlaksananya monev desa binaan dan PM2L	N.Bulik	Terlaksananya monev desa binaan dan PM2L	1 tahun	52.500.000	
	Monitoring dan Evaluasi PPSP	N.Bulik	Terlaksananya monev PPSP	1 tahun	63.892.500	Terlaksananya monev PPSP	N.Bulik	Terlaksananya monev PPSP	1 tahun	63.892.500	
	Pemanfaatan SDDKN	N.Bulik	Terlaksananya pemanfaatan SDDKN	1 tahun	99.525.038	Terlaksananya pemanfaatan SDDKN	N.Bulik	Terlaksananya pemanfaatan SDDKN	1 tahun	99.525.038	
	<b>Program Bidang Keagamaan</b>		<b>Meningkatnya Pelayanan Keagamaan kepada masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>700.680.750</b>	<b>Program Bidang Keagamaan</b>	<b>100%</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Keagamaan kepada masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>700.680.750</b>	
	Bimb./Penyuluhan Remaja Mesjid	N.Bulik	Terlaksananya penyuluhan Remaja Mesjid	1 kl	57.750.000	Terlaksananya penyuluhan Remaja Mesjid	N.Bulik	Terlaksananya penyuluhan Remaja Mesjid	1 kl	57.750.000	
	Bimb. Keluarga Sakinah	N.Bulik	Terlaksananya Bimbingan Keluarga Sakinah	1 kl	57.750.000	Terlaksananya Bimbingan Keluarga Sakinah	N.Bulik	Terlaksananya Bimbingan Keluarga Sakinah	1 kl	57.750.000	
	Penyelenggaraan safari Ramadhan	N.Bulik	Terlaksananya Kegiatan Safari Ramadhan	1 tahun	93.922.500	Terlaksananya Kegiatan Safari Ramadhan	N.Bulik	Terlaksananya Kegiatan Safari Ramadhan	1 tahun	93.922.500	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji	N.Bulik	Terlaksananya fasilitasi ibadah haji	1 kl	260.310.750	Terlaksananya fasilitasi ibadah haji		Terlaksananya fasilitasi ibadah haji	1 kl	260.310.750	
	Penyelenggaraan Kunjungan Natal	N.Bulik	Terlaksananya kunjungan natal	1 tahun	162.697.500	Terlaksananya kunjungan natal		Terlaksananya kunjungan natal	1 tahun	162.697.500	
	Bimbingan Keluarga Kristen Bahagia	N.Bulik	Terlaksananya Kegiatan Bimbingan	1 kl	68.250.000	Terlaksananya Kegiatan Bimbingan		Terlaksananya Kegiatan Bimbingan	1 kl	68.250.000	
	<b>Program Kesejahteraan Rakyat</b>		<b>Meningkatnya Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>683.750.000</b>	<b>Program Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>100%</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Keagamaan kepada masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>683.750.000</b>	
	Sertifikasi Tanah Masyarakat	N.Bulik	Terlaksananya Kegiatan sertifikasi	1 tahun	300.000.000	Terlaksananya Kegiatan sertifikasi		Terlaksananya Kegiatan sertifikasi	1 tahun	300.000.000	
	Khitanan Massal	N.Bulik	Terlaksananya khitanan masal bagi keluarga tidak mampu	1 kl	60.000.000	Terlaksananya khitanan masal bagi keluarga tidak mampu	N.Bulik	Terlaksananya khitanan masal bagi keluarga tidak mampu	1 kl	60.000.000	
	Pembinaan Mental Spritual /Keagamaan	N.Bulik	Terlaksananya pembinaan mental spritual	1 kl	60.000.000	Terlaksananya pembinaan mental spritual	N.Bulik	Terlaksananya pembinaan mental spritual	1 kl	60.000.000	
	Isbat Nikah bagi kluarga tidak mampu	N.Bulik	Terlaksananya isbat nikah bagi keluarga tidak mampu	1 kl	85.000.000	Terlaksananya isbat nikah bagi keluarga tidak mampu	N.Bulik	Terlaksananya isbat nikah bagi keluarga tidak mampu	1 kl	85.000.000	
	Koordinasi dan Konsultasi bidang Kesra	N.Bulik	Terlaksananya koordinasi	1 tahun	100.000.000	Terlaksananya koordinasi	N.Bulik	Terlaksananya koordinasi	1 tahun	100.000.000	
	Pemeliharaan dan Operasional Mahasiswa	N.Bulik	Tersedianya biaya operasional asrama mahasiswa	1 tahun	75.000.000	Tersedianya biaya operasional asrama mahasiswa	N.Bulik	Tersedianya biaya operasional asrama mahasiswa	1 tahun	75.000.000	

Program Pembinaan Administrasi Desa /Kelurahan		Meningkatnya sarana kerja aparatur desa	100%	190.000.000	Program Pembinaan Administrasi Desa /Kelurahan	100%	Meningkatnya sarana kerja aparatur desa	100%	190.000.000
Pengadaan Buku Administrasi Desa/Kelurahan	N.Bulik	Tersedianya buku administrasi desa	1 paket	90.000.000	Tersedianya buku administrasi desa	N.Bulik	Tersedianya buku administrasi desa	1 paket	90.000.000
Fasilitasi PATEN	Kab. Lamandau	Tersedianya Fasilitasi PATEN	1 Kegiatan	100.000.000	Tersedianya Fasilitasi PATEN	Kab. Lamandau	Tersedianya Fasilitasi PATEN	1 Paket	100.000.000

Program dukungan pelaksanaan tugas KDH/WKDH		Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas KDH/WKDH	100%	2.064.424.000	Program dukungan pelaksanaan tugas KDH/WKDH	100%	Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas KDH/WKDH	100%	2.064.424.000
Pelayanan kerumahtanggaan KDH/WKDH	N.Bulik	Terlaksananya pelayanan kerumahtanggaan KDH/WKDH	1 tahun	1.050.000.0000	Terlaksananya pelayanan kerumahtanggaan KDH/WKDH	N.Bulik	Terlaksananya pelayanan kerumahtanggaan KDH/WKDH	1 tahun	1.050.000.0000
Pemeliharaan Rujab dan barang inventaris KDH/WKDH	N.Bulik	Terlaksananya pemeliharaan rujab dan barang inventaris KDH/WKDH	1 tahun	194.250.000	Terlaksananya pemeliharaan rujab dan barang inventaris KDH/WKDH	N.Bulik	Terlaksananya pemeliharaan rujab dan barang inventaris KDH/WKDH	1 tahun	194.250.000
Pemeliharaan kendaran dinas /Jabatan KDH/WKDH	N.Bulik	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/jabatan KDH/WKDH	1 tahun	147.924.000	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/jabatan KDH/WKDH	N.Bulik	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/jabatan KDH/WKDH	1 tahun	147.924.000
Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH	N.Bulik	Terlaksananya pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH	1 tahun	367.500.000	Terlaksananya pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH	N.Bulik	Terlaksananya pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH	1 tahun	367.500.000
Pengadaan pakaian dinas KDH/WKDH	N.Bulik	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas KDH/WKDH	1 paket	100.000.000	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas KDH/WKDH	N.Bulik	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas KDH/WKDH	1 paket	100.000.000
Pengadaan barang Inventaris KDH/WKDH	N.Bulik	Terlaksananya pengadaan barang Inventaris KDH/WKDH	1 paket	204.750.000	Terlaksananya pengadaan barang Inventaris KDH/WKDH	N.Bulik	Terlaksananya pengadaan barang Inventaris KDH/WKDH	1 paket	204.750.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>37.657.000.000</b>	<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>37.657.000.000</b>

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari unsur masyarakat lainnya yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

**TABEL 3.1.**  
**Keterkaitan Isu dan Kebijakan Kabupaten, Provinsi, Nasional**

No.	Kebijakan		
	Kabupaten	Provinsi	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Ekonomi Berbasis Lokal dengan Tetap Menjaga Kelestarian Alam dan Lingkungan	Pengembangan Ekonomi Unggulan Daerah yang mengutamakan lingkungan hidup seperti Program Reducing Emisions from Deforestation dan Forest Degradation(REDD+)	Komitmen terhadap Milenium Development Goals (MDG 21)
2.	Pengentasan Desa Tertinggal dan Bina Desa	Mewujudkan pembangunan adil dan merata melalui program PM2L, Geber MLT, Kalteng Barigas, Kalteng Harati/Cerdas, Jumat Beriman, dll.	Program Pengentasan kemiskinan Nasional (PNPM)
3.	Meningkatkan kerjasama pembangunan Infrastruktur dan perkembangan cluster pertumbuhan berbasis lokal (gaharu)	Pembangunan Kawasan Pertumbuhan dan Pelaksanaan Program Infrastruktur	Pembangunan Area /Kawasan MP3EI

Sumber: RPJMD Kab.Lamandau 2009-2013, RPJMD Prov.Kalteng 2010-2015 dan RPJMN 2010-2014

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi, dan arah

---

*Rencana Kerja --- Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau 2015*

pembangunan daerah Kabupaten Lamandau yang *merupakan satu kesatuan* dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.

- 1) Visi adalah sebagai penggambaran kondisi ideal yang akan dicapai dimasa depan dimana keberhasilan pelayanan publik, administrasi dan pemerintahan yang baik merupakan prioritas utama dalam mempercepat pembangunan di Kabupaten Lamandau. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau menetapkan Visi Tahun 2013-2018 yang dirumuskan menjadi sebagai berikut : “ TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK, ADMINISTRASI DAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK ” yang berarti dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Lamandau untuk mensejahterakan masyarakat perlu didukung upaya memberikan pelayanan publik, administrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
- 2) Dalam rangka mewujudkan Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau kedepan, maka dirumuskan Misi tunggal Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 sebagai berikut : “ MELAKSANAKAN SISTEM ADMINISTRASI PELAYANAN DAN KEPEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH. “Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau dalam pembangunan, pengembangan dan penjabarannya adalah sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan administrasi kepemimpinan yang baik dan profesional dengan sasaran-sasaran sebagai berikut :
    - (1) Terlaksananya kebijakan keuangan secara selektif dan profesional dengan melaksanakan tertib administrasi keuangan secara konsisten ;
    - (2) Terciptanya database kepegawaian yang mampu memberikan akses informasi akurat ;
    - (3) Terlaksananya mekanisme inventarisasi barang dan aset daerah ;
    - (4) Terciptanya sistem pengarsipan dan dokumentasi ;
  - b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan organisasi dengan sasaran-sasaran sebagai berikut :
    - (1) Meningkatnya sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten Lamandau ;
    - (2) Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang representatif.

- c. Terwujudnya peraturan perundang-undangan sebagai pendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan sasaran-sasaran sebagai berikut :
- (1) Terbentuknya struktur organisasi dan kelembagaan perangkat daerah yang ramping dan kaya fungsi ;
  - (2) Terlaksananya mekanisme dan tata kerja kelembagaan perangkat daerah;
  - (3) Terwujudnya Peraturan daerah dan produk-produk hukum sesuai dengan kebutuhan ;
  - (4) Meningkatnya hubungan antar lembaga pemerintah.
- d. Meningkatkan pembinaan sosial ekonomi masyarakat dan dunia usaha dengan sasaran-sasaran sebagai berikut :
- (1) Terlaksananya peningkatan sosial ekonomi masyarakat ;
  - (2) Terlaksananya pembinaan hubungan kerja antar dunia usaha.

Berdasarkan visi tersebut, maka sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Misi yang diemban oleh SEKRETARIAT DAERAH adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya pencapaian visi yang telah ditetapkan. Adanya pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran suatu organisasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu misi suatu organisasi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kriteria berikutnya yang dijadikan dasar penilaian dan pemilihan usulan program dan kegiatan adalah relevansinya dengan visi RPJM Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 yaitu ***“Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamandau dan terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik bebas dari KKN yang dilandasi oleh Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa “***. Secara lebih spesifik dapat disebutkan bahwa program dan kegiatan terpilih harus terkait langsung dengan upaya :

- a. Membuka keterisolasian daerah, dalam rangka peningkatan aksesibilitas antar sektor terkait dalam wilayah Kabupaten Lamandau;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

### **3.3. Program dan Kegiatan SKPD**

Rencana Kerja (renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 merupakan pedoman program dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lamandau periode 2013-2018. Dokumen Renja disusun ke dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang lebih detail dalam Program Prioritas dan Kegiatan Tahun 2015 seperti yang tertuang dalam DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau sebagai berikut :

#### **1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;**

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan Komponen listrik dan penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan peralatan rumah tangga
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar negeri
- Penyediaan Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)
- Pengelolaan LPSE

**2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;**

- Pembangunan rumah jabatan Wakil Bupati Lamandau Tahap I
- Pengembangan Aula SETDA
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas
- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- Rehabilitasi sedang / berat Kendaraan dinas / operasional
- Pembebasan Lahan Untuk Pemda
- Pembangunan Gedung TVRI
- Pembangunan Parkir Tertutup SETDA
- Rehabilitasi Rujab Bupati Lamandau lama
- Pengadaan Karpet dan Ambal untuk PHBI
- Pembangunan gedung Arsip/Dokumen Keuangan SETDA

**3) Program peningkatan disiplin aparatur ;**

- Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

**4) Program fasilitas pindah purna tugas PNS ;**

- Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas

**5) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ;**

- Pendidikan dan Pelatihan formal
- Raker camat, Kepala desa / Lurah dan Ketua BPD
- Pelatihan administrasi desa
- Studi banding camat,kades, dan lurah
- Studi banding damang dan sekretaris damang
- Pelatihan dan sosialisasi LPSE
- Pelatihan dan peningkatan kemampuan aparatur desa

**6) Program Promosi dan Kerjasama Investasi**

- Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten

**7) Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH ;**

- Dialog / Audiensi dengan tokoh masyarakat dll
- Penerimaan kunker pejabat Negara / departemen / Lembaga non Departemen / Luar Negeri
- Rakor pejabat Pemerintah Daerah

- kunker / Inspeksi KDH / WKDH
  - Koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah daerah lainnya
  - Rapat Koordinasi unsur Muspida
- 8) **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ;**
- Penatausahaan keuangan di lingkungan Setda
  - Manajemen pengelolaan barang Milik daerah ( Setda )
  - Penyusunan Anggaran di Lingkungan Setda
- 9) Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- Pemdampingan Portal Informasi Berbasis WEB
- 10) **Program Penataan Peraturan Perundang-undangan ;**
- Pembuatan Perda dan Perkada
  - Sosialisasi Perda Kabupaten lamandau
  - Program Legislasi Daerah ( Prolegda )
  - Penyuluhan Hukum Terpadu
- 11) **Program Penataan Daerah Otonomi Baru ;**
- Fasilitas percepatan penyelesaian tapal batas wilayah Amd antar Daerah
  - Penyusunan LPPD dan ILLPD
  - Tata batas antar Desa dan Kecamatan
  - Tim fasilitasi Rupa Bumi
  - Pelaksanaan tugas dan fungsi peneliti dan pengawas pemilihan Kepala Desa
  - Tim Fasilitasi ADD
- 12) **Program Pembangunan Informasi ;**
- Publikasi dan Informasi kegiatan Pembangunan
  - Kerjasama dengan Media cetak dan Elektronik
  - Kliping koran
  - Buletin Bahaum Bakuba
  - Pengelolaan RSPD
  - Biaya Operasional TVRI
  - Pendampingan dan peliputan kunjungan KDH/WKDH
  - Sistem pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat
- 13) **Program Dokumentasi Hukum dan Peta Permasalahan Hukum ;**
- Bantuan Hukum, sengketa Hukum dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
  - Dokumentasi hukum dan informasi hukum
- 14) **Program Peningkatan Sarana Perekonomian ;**
- Pendistribusian, Monitoring dan Evaluasi Program Raskin
- 15) **Program Pembinaan Dunia Usaha dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ;**

- Peningkatan Pengetahuan Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Masyarakat

**16) Program Sosialisasi dan Pembinaan Hukum ;**

- Lomba Kadarkum
- Rencana aksi nasional hak asasi nasional(Ranham)
- Rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi
- Pembentukan dan pembinaan desa /kelurahan sadar hukum

**17) Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi ;**

- Penyusunan LAKIP Setda
- Fasilitasi LHKPN
- Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
- Pembuatan profil kelembagaan
- Sosialisasi dan pelatihan pengisian formulir LHPKN
- Penyusunan SOP
- Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja
- Penyusunan Lakip Kabupaten/Sosialisasi dan Pendampingan BPKP

**18) Program Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan ;**

- Penyiapan Data Informasi serta laporan Pembangunan di Lingkungan Setda
- Penetapan Kinerja serta Program dan Kegiatan setda
- Inventarisasi dan Identifikasi Hasil Pembangunan
- Pembinaan desa PM2L dan Desa Binaan
- Monitoring dan evaluasi Percepatan dan pembangunan Sanitasi Permukiman
- Pemanfaatan sistem database dukungan kebijakan nasional

**19) Program Bidang Keagamaan ;**

- Bimbingan / Penyuluhan Remaja ( Masjid / Gereja )
- Bimbingan Keluarga Sakinah
- Penyelenggaraan safari ramadhan
- Fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji
- Penyelenggaraan kunjungan natal
- Bimbingan keluarga Kristen Bahagia

**20) Program Kesejahteraan Rakyat ;**

- Khitanan Massal bagi Keluarga Tidak Mampu
- Isbat Nikah bagi Keluarga Tidak Mampu
- Koordinasi dan Konsultasi Bidang Kesejahteraan rakyat
- Pembinaan mental spritual /Keagamaan
- Sertifikasi tanah masyarakat
- Pemeliharaan dam Operasional Asrama Mahasiswa

- 21) **Program Pelaksanaan Tugas KDH / WKDH ;**
- Pelayanan Kerumahtanggaan KDH / WKDH
  - Pemeliharaan Rujab dan Barang Inventaris KDH / WKDH
  - Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Jabatan KDH / WKDH
  - Pemeliharaan Kesehatan KDH / WKDH
  - Pengadaan Pakaian Dinas KDH dan WKDH
  - Pengadaan Barang Inventaris KDH/WKDH
- 22) **Program Pembinaan Administrasi Desa**
- Pengadaan Buku administrasi Desa dan Kelurahan
  - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )
- 23) **Program Pembinaan dan Pengembangan Birokrasi**
- Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
  - Penyusunan dan Sosialisasi IKM
  - Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

## BAB IV

### PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

**Output Rencana Kerja** Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau adalah **Program Tahunan** Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau. Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2015, dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten Lamandau, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Lamandau.

**Sekretaris Daerah  
Kabupaten Lamandau,**

**Drs. ARIFIN LP.UMBING, M.A.P**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 195812261980011001



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

## SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Komplek Perkantoran PEMDA Lamandau, Bukit Hibul Nanga Bulik 74662

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR : 188.45/ 26 /VI/HUK/2014

#### TENTANG

#### RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2015

#### SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2015, perlu disusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2015 dalam penyusunan ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Lamandau dan RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten Lamandau Tahun (2013 – 2018) ;
- b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten BaritoTimur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah.....

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01);
20. Peraturan Daerah.....

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 18 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 28 Seri D) sebagaimana telah diubah Pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Lembaga Teknis Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 38);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 122 Seri E);
25. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2010 Nomor 133);
26. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Perubahan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor 295).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2015.**

KESATU : Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 adalah pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi Sekretariat Daerah sebagaimana Dokumenter lampiran pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Rencana Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, bertujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Nanga Bulik  
pada tanggal 01 Juli 2014

a.n. Bupati Lamandau  
Sekretaris Daerah,

**Drs. ARIFIN LP. UMBING, M.A.P**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19581226 198001 1 001**

**Rencana Program dan Kegiatan Perioritas Daerah pada RKPd Tahun 2015**  
Kabupaten Lamandau  
SEKRETARIAT DAERAH

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	JENIS KEGIATAN a/b/c	
					CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	<b>URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM</b>													
	<b>SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU</b>										<b>49.474.792.750</b>	<b>40.177.154.782</b>		
	- <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>										11.817.792.750	8.232.516.844		
	- <b>BELANJA LANGSUNG</b>										37.657.000.000	31.944.637.938		
I.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Pemerintahan</b>	<b>Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah</b>		<b>persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>					<b>10.152.698.296</b>	<b>10.660.333.211</b>		
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Nanga Bulik			Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Tersedianya kebutuhan surat menyurat dan materai	10.000 Lembar	52.500.000	55.125.000	a	
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Nanga Bulik			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar	12 bulan	556.805.983	584.646.282	a	
	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Nanga Bulik			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 kali sewa	Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar	12 bulan	16.800.000	17.640.000	a	
	4. Penyediaan jasa administrasi keuangan			Nanga Bulik			Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	Terbayarnya honorarium administrasi keuangan	12 bulan	1.441.270.832	1.513.334.374	a	
	5. Penyediaan jasa kebersihan kantor			Nanga Bulik			Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	30 orang	Terbayarnya Honor Petugas Kebersihan Kantor	12 Bulan	378.000.000	396.900.000	a	
	6. Penyediaan alat tulis kantor			Nanga Bulik			Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar	12 Bulan	232.260.000	243.873.000	a	
	7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Nanga Bulik			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	162.750.000	170.887.500	a	
	8. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor			Nanga Bulik			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar	12 bulan	26.250.000	27.562.500	a	
	9. Penyediaan peralatan rumah tangga			Nanga Bulik			Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga kantor	12 bulan	47.250.000	49.612.500	a	
	10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Nanga Bulik			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar	12 Bulan	1.765.296.227	1.853.561.038	a	
	11. Penyediaan makanan dan minuman			Nanga Bulik			Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum	12 Bulan	Terbayarnya uang Makan dan Minum Kegiatan Rapat	12 Bulan	697.200.000	732.060.000	a	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	JENIS KEGIATAN a/b/c	
					CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET				
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			Luar Daerah			Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan keluar daerah	300 kali		Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar	12 bulan	1.470.000.000	1.543.500.000	a
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah			Dalam Daerah			Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan kedalam Daerah	400 kali		Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar	12 bulan	666.750.000	700.087.500	a
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keLuar Negeri			Luar Negeri			Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan keluar Negeri	1 kali		Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar	12 bulan	131.250.000	137.812.500	a
15	Penyediaan Operasional Unit Layanan Pengadaan			Nanga Bulik			Tersedianya Operasional Unit Layanan Pengadaan	12 bulan		Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar	12 bulan	1.315.398.000	1.381.167.900	a
16	Pengelolaan LPSE			Nanga Bulik			Tersedianya Pengelolaan LPSE	12 bulan		Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar	12 bulan	1.192.917.254	1.252.563.117	a
II.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Pemerintahan</b>	<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah</b>		<b>Persentase cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>						<b>9.676.859.000</b>	<b>2.758.820.700</b>	
1.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas			Nanga Bulik			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	200m2		Perumahan Layak Huni	12 bulan	19.950.000	20.947.500	a
2.	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional			Nanga Bulik			Bertambahnya kendaraan dinas/operasional roda 4	6 Unit		Daya Tampung Meningkatkan	6 unit	3.000.000.000	0	a
3.	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional			Nanga Bulik			Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	10 unit		Umur Fungsional Meningkatkan	10 unit	425.250.000	435.881.250	a
4.	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor			Nanga Bulik			Gedung Kantor Terpelihara	1000m2,PBB,Pa gar 1300m		Umur Fungsional Meningkatkan	1 tahun	160.125.000	168.131.250	a
5.	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional			Nanga Bulik			Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara	36 unit		Umur Fungsional Meningkatkan	1 tahun	759.234.000	797.195.700	a
6.	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor			Nanga Bulik			Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	140 unit		Umur Fungsional Meningkatkan	1 Tahun	237.300.000	249.165.000	a
7.	Pembangunan Rumah Jabatan Wakil Bupati Lamandau Tahap I			Nanga Bulik			Terlaksananya Pembangunan Rumah Jabatan Wakil Bupati Lamandau	500m2		Tersedianya Rumah Jabatan Wakil Bupati Lamandau	1 unit	2.375.000.000	1.087.500.000	a
8.	Pembangunan Gedung TVRI			Nanga Bulik			Tersedianya Gedung TVRI	1 unit		Gedung Siaran TVRI Kalteng	1 unit	0	0	a
9.	Pembangunan Parkir Tertutup SETDA			Nanga Bulik			Tersedianya Parkir Tertutup SETDA	1 unit		Parkir Tertutup Pejabat SETDA	1 unit	600.000.000	0	a
10.	Pembangunan Gedung Arsip/Dokumen Keuangan SETDA			Nanga Bulik			Tersedianya Gedung Arsip/Dokumen Keuangan SETDA	1 unit		Pengarsipan Dokumen Keuangan SETDA	1 unit	300.000.000	0	a
11.	Pengadaan Karpet dan Ambal untuk PHBI			Nanga Bulik			Tersedianya karpet dan ambal untuk sholat PHBI	1 Paket		Terlaksananya pengadaan alat sholat PHBI	1 Paket	100.000.000	0	a

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	JENIS KEGIATAN a/b/c
					CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET			
12.	Rehabilitasi Rujab Bupati yang lama			Nanga Bulik			Terlaksananya rehabilitasi Rujab Bupati yang lama	1 Paket	Tersedianya Gedung Sekretariat PKK	1 Paket	200.000.000	0	a
13	Pengembangan aula SETDA			Nanga Bulik			Tersediannya pengembangan aula SETDA	1 Paket	Tersediannya Aula SETDA	1 Paket	0	0	a
14	Pembebasan lahan untuk Pemda			Nanga Bulik			Terlaksananya pembebasan lahan untuk Pemda	1 Paket	Tersedianya Lahan untuk Pemda	1 Paket	1.500.000.000	0	a
<b>III.</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Pemerintahan</b>	<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah</b>		<b>Tingkat kepatuhan pegawai</b>	<b>100%</b>					<b>169.312.500</b>	<b>177.778.125</b>	
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya			Nanga Bulik			Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur	1 Jenis	Daya Guna Pakaian Khusus Hari Kerja Meningkat	1 Tahun	169.312.500	177.778.125	a
<b>IV.</b>	<b>Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS</b>	<b>Pemerintahan</b>	<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah</b>		<b>Persentase pemulangan aparatur yang tewas dalam tugas</b>	<b>100%</b>					<b>42.000.000</b>	<b>44.100.000</b>	
1.	Pemulangan Pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas						Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	12 bulan	Fasilitasi Pemulangan Pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	12 bulan	42.000.000	44.100.000	a
<b>V.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Pemerintahan</b>	<b>Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya</b>	<b>70%</b>					<b>1.175.750.000</b>	<b>1.221.812.500</b>	
1.	Pendidikan dan pelatihan formal			Luar Daerah			Keikutsertaan Aparatur dalam Diklat Formal	15 kali	Terdidik dan terlatihnya Sumber Daya Aparatur Secara Formal	20 Orang	157.500.000	165.375.000	a
2.	Rapat Kerja Camat, Kepala Desa/Lurah dan Ketua BPD			Nanga Bulik			Keikutsertaan Aparatur Kecamatan dan Desa dalam Rapat Kerja	1 Kali	Tersusunnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Bagi Kecamatan dan Desa	171 orang	210.000.000	220.500.000	a
3.	Pelatihan Administrasi Desa			Nanga Bulik			Keikutsertaan Aparatur Desa dalam Pelatihan	1 Kali	Terdidik dan terlatihnya Administrasi Desa	91 Orang	99.750.000	104.737.500	a
4.	Studi Banding Camat, Lurah dan Kades			Luar Daerah			Keikutsertaan Aparatur Kecamatan dan Desa dalam Studi Banding	1 Kali	Perbandingan Tata Pemerintahan Kecamatan dan Desa dengan Provinsi Lain	45 orang	254.500.000	260.862.500	a
5.	Pelatihan Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa			Nanga Bulik			Keikutsertaan Aparatur Desa dalam Pelatihan	1 kali	Terdidik dan terlatihnya Aparatur Desa	80 Orang	94.500.000	99.225.000	a
6.	Studi Banding Damang dan Sekretaris Damang			Luar Daerah			Keikutsertaan Aparatur Damang dan Sekretaris Damang dalam Studi Banding	1 Kali	Perbandingan Adat dan Budaya Desa dengan Provinsi Lain	30 Orang	254.500.000	260.862.500	a
7.	Pelatihan dan Sosialisasi LPSE			Nanga Bulik			Keikutsertaan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pihak Ketiga dalam Pelatihan dan Sosialisasi LPSE	1 Kali	Terdidik dan terlatihnya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pihak Ketiga	100 Orang	105.000.000	110.250.000	a

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	JENIS KEGIATAN a/b/c	
					CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET				
VI.	Program promosi dan kerjasama investasi	Ekonomi	Meningkatnya investasi yang mendorong kesempatan dan penciptaan lapangan kerja serta lapangan usaha		persentase promosi investasi	100%						73.500.000	77.175.000	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	JENIS KEGIATAN a/b/c
					CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET			
VII.	1. Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten	Pemerintahan	Meningkatnya pelayanan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Nanga Bulik	cakupan pelayanan kedinasan KDH/WKDH	100%	keikutsertaan dalam Pameran Tingkat Kabupaten	1 Kegiatan	Terpublikasinya Informasi Hasil Pembangunan Daerah	1 Kegiatan	73.500.000	77.175.000	a
	1. Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan			Kab. Lamandau			Terlaksananya Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	20 kali	selarasnya Aspirasi tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan dengan Program Kerja KDH/WKDH	1 tahun	157.500.000	165.375.000	a
	2. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri			Nanga Bulik			Terlaksananya Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	25 kali	Menjalin Kerjasama di Beberapa Sektor dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen	1 Tahun	315.000.000	330.750.000	a
	3. Rapat Koordinasi Unsur Muspida			Nanga Bulik			Terlaksananya Rapat Koordinasi Unsur Muspida	2 kali	Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar	1 Tahun	173.617.500	182.298.375	a
	4. Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah			Nanga Bulik			Terlaksananya Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	1 kali	Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar	1 Tahun	52.500.000	55.125.000	a
	5. Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			Nanga Bulik			Terlaksananya Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	50 kali	Pemantauan Pemerintahan/Pembangunan Kabupaten Lamandau	1 Tahun	630.000.000	661.500.000	a
VIII.	6. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah	Luar Daerah	Cakupan pelayanan keuangan daerah	100%	Terlaksananya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	50 kali	Keselarasan Program Kerja Pemerintah Kab. Lamandau dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya	1 tahun	630.000.000	661.500.000	a
	1. Penatausahaan Keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah			Nanga Bulik			Terlaksananya Penatausahaan Keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah	1 Tahun	Tertib Administrasi Penatausahaan Keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah	1 Tahun	164.885.616	173.129.897	a
	2. Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah			Nanga Bulik			Terlaksananya Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	Tata kelola Manajemen yang baik dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	157.237.500	165.099.375	a
IX.	3. Penyusunan anggaran di lingkungan SETDA	Pemerintahan	Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat	Nanga Bulik	Persentase penerapan e-government	100%	Terlaksananya Penyusunan anggaran di lingkungan SETDA	1 Tahun	Tersusunnya anggaran di lingkungan SETDA	1 Tahun	105.551.250	110.828.813	a
	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi												
											574.875.000	575.162.438	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	JENIS KEGIATAN a/b/c	
					CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET				
1.	Pendampingan Portal informasi berbasis web			Nanga Bulik			Terlaksananya Pendampingan Portal informasi berbasis web	1 Kegiatan		Surat dan Informasi elektronik seluruh SKPD Kab. Lamandau	1 Kegiatan	574.875.000	575.162.438	a

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	JENIS KEGIATAN a/b/c								
					CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN														
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET											
X.	<b>Program Penataan peraturan perundang-undangan</b>	Pemerintahan	Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah		Persentase Perda yang disosialisasikan dan ditetapkan	100%					672.000.000	705.600.000									
	1. Pembuatan Perda dan Peraturan Kepala Daerah													Kabupaten Lamandau	Tersusunnya Perda dan Peraturan Kepala Daerah	10 Dokumen	Dokumen Perda dan Peraturan Kepala Daerah	10 dokumen	199.500.000	209.475.000	a
	2. Sosialisasi Perda Kabupaten Lamandau													Kabupaten Lamandau	Terlaksananya Sosialisasi Perda Kabupaten Lamandau	8 Kecamatan	Terpublikasinya Perda Kab. Lamandau	8 kecamatan	278.250.000	292.162.500	a
	3. Kegiatan Program Legislasi Daerah ( Proledga )													Nanga Bulik	Terlaksananya Program Legislasi Daerah ( Proledga )	1 Tahun	Penyaringan Perda Yang Prioritas yang dibutuhkan masyarakat	1 Tahun	47.250.000	49.612.500	a
4. Penyuluhan Hukum terpadu	Kabupaten Lamandau	Terlaksananya Penyuluhan Hukum terpadu	1 Kegiatan	Terciptanya masyarakat yang taat akan hukum	300 orang	147.000.000	154.350.000	a													
XI.	<b>Program penataan daerah otonomi baru</b>	Infrastruktur	Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang		persentase tersedianya jumlah luas lahan bersertifikat	100%					486.108.000	509.873.400									
	1. Tim fasilitasi Rupa Bumi													Kabupaten Lamandau	terbentuknya tim fasilitasi rupa bumi	1 kegiatan	update rupa bumi kab.lamandau	1 dokumen	68.250.000	71.662.500	a
	2. Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah													Kabupaten lamandau	terlaksananya percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	1 dokumen	kejelasan tapal batas wilayah administrasi antar daerah	1 dokumen	147.000.000	154.350.000	a
	3. Tata batas antar desa dan kecamatan													Kabupaten lamandau	terlaksananya Tata batas antar desa dan kecamatan	1 Tahun	kejelasan Tata batas antar desa dan kecamatan	1 Tahun	58.800.000	61.740.000	a
	4. Penyusunan LPPD dan ILPPD													Kabupaten Lamandau	tersusunnya laporan LPPD dan ILPPD	1 laporan	pertanggungjawaban atas Pemerintahan Daerah	1 Laporan	106.008.000	111.308.400	a
	5. Pelaksanaan tugas dan fungsi peneliti dan pengawas pemilihan kepala desa													Kabupaten Lamandau	terlaksananya Pelaksanaan tugas dan fungsi peneliti dan pengawas pemilihan kepala desa	1 Dokumen	pemilihan Kepala Desa yang sesuai aturan	1 Dokumen	57.750.000	60.637.500	a
6. Tim Fasilitasi ADD	Kabupaten Lamandau	Tersusunnya Tim Fasilitasi ADD	1 Laporan	Tepat Guna dalam Penggunaan ADD	1 Laporan	48.300.000	50.175.000	a													
XII.	<b>Program Pembangunan Informasi</b>	Pemerintahan	Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat		Persentase meningkatnya penyebaran Informasi	100%					4.483.994.550	4.708.194.278									

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	JENIS KEGIATAN a/b/c		
					CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN					HASIL KEGIATAN	
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				TOLAK UKUR	TARGET
XIII.	1. Publikasi dan informasi kegiatan pembangunan	Pemerintahan	Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah	Kabupaten Lamandau	penyelesaian kasus bantuan hukum	100%	terlaksananya Publikasi dan informasi kegiatan pembangunan	1 Tahun	terpublikasinya kegiatan pembangunan di kab. Lamandau	1 Tahun	546.000.000	573.300.000	a
	2. Kerjasama dengan media cetak dan elektronik			Kabupaten Lamandau			terjalinnnya Kerjasama dengan media cetak dan elektronik	1 Tahun	Publikasi kegiatan pembangunan kab. Lamandau	1 Tahun	3.223.290.000	3.384.454.500	a
	3. Sistem pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat			Kabupaten Lamandau			terlaksananya Sistem pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat	1 Tahun	memudahkan informasi pada masyarakat dan memfasilitasi pengaduan masyarakat	1 Tahun	98.226.450	103.137.773	a
	4. Kliping Koran			Kabupaten Lamandau			tersedianya kliping koran	1 Tahun	Dokumen Kegiatan	1 Tahun	42.000.000	44.100.000	a
	5. Buletin bahaum bakuba			Kabupaten Lamandau			tercetaknya buletin Bahaum Bakuba	1 Tahun	Bahan Informasi Kegiatan Pembangunan Kab. Lamandau	1 Tahun	191.625.000	201.206.250	a
	6. Pengelolaan RSPD			Nanga Bulik			Tersedianya Operasional RSPD	1 Tahun	Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar	1 Tahun	173.649.000	182.331.450	a
	7. Biaya Operasional TVRI			Nanga Bulik			Tersedianya Operasional TVRI	1 Tahun	Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar	1 Tahun	125.991.600	132.291.180	a
	8. Pendampingan dan peliputan kunjungan Bupati/Wakil Bupati			Kabupaten Lamandau			terlaksananya Pendampingan dan peliputan kunjungan Bupati/Wakil Bupati	1 Tahun	Publikasi Kegiatan Kunjungan Bupati/Wakil Bupati	1 Tahun	83.212.500	87.373.125	a
	<b>Program dokumentasi hukum dan peta permasalahan hukum</b>												
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													
XIII.													

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	JENIS KEGIATAN a/b/c		
					CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN					HASIL KEGIATAN	
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				TOLAK UKUR	TARGET
1.	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia ( RANHAM ) Tahun 2015					terlaksananya Rencana Aksi nasional hak asasi manusia ( RANHAM ) Tahun 2014	1 Kegiatan	pemahaman masyarakat ttg RANHAM	100 orang	84.000.000	88.200.000	a	
2.	Lomba kesadaran hukum					terlaksananya Lomba kesadaran hukum	1 Kegiatan	partisipasi pihak masyarakat dalam lomba	32 orang	84.000.000	88.200.000	a	
3.	Rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi					terlaksananya Rencana aksi pencagahan dan pemberantasan korupsi terbentuk dan terbinanya desa / kelurahan sadar hukum	1 Laporan	Pemerintahan yang bersih dari korupsi	1 Laporan	157.500.000	165.375.000	a	
4.	Pembentukan dan Pembinaan desa / kelurahan sadar hukum						3 desa	masyarakat yang sadar hukum	3 desa	105.000.000	110.250.000	a	
<b>XVII.</b>	<b>Program pembinaan dan pengembangan organisasi</b>	<b>Pemerintahan</b>	<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah</b>		<b>cakupan penerapan SOP SKPD</b>	<b>100%</b>				<b>1.123.338.500</b>	<b>1.069.505.425</b>		
1.	Penyusunan Lakip SETDA					tersusunnya Lakip SETDA	1 dokumen	Laporan Kinerja Pemerintah	1 Dokumen	9.838.500	10.330.425	a	
2.	Fasilitasi LHKPN					Terfasilitasinya LHKPN	1 Laporan	pelaporan kekayaan pejabat Negara	1 Laporan	52.500.000	55.125.000	a	
3.	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah					Tertatanya Kelembagaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Struktur Organisasi dan tupoksi	1 Dokumen	105.000.000	110.250.000	a	
4.	Pembuatan profil kelembagaan					terciptanya Profil kelembagaan	1 Dokumen	Profil lembaga SKPD	1 Dokumen	52.500.000	55.125.000	a	
5.	Penyusunan analisa jabatan dan ABK					tersusunnya analisa jabatan&ABK	2 Dokumen	Penerimaan CPNS Kab. Lamandau	1 Dokumen	504.000.000	529.200.000	a	
6.	Penyusunan SOP Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau					tersusunnya SOP Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	1 Dokumen	Pengukur Kinerja Organisasi	1 Dokumen	199.500.000	209.475.000	a	
7.	Penyusunan Lakip Kabupaten /Sosialisasi dan Pendampingan BPKP					terlaksananya pendampingan	1 kegiatan	tersusunnya Dokumen LAKIP Kab	1 dokumen	200.000.000	100.000.000		
<b>XVIII.</b>	<b>Program pengembangan dan pemantauan pembangunan</b>	<b>Pemerintahan</b>	<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah</b>		<b>Jumlah dokumen perencanaan,kegiatan dan pelaporan tepat waktu</b>	<b>100%</b>				<b>499.917.538</b>	<b>524.913.414</b>		
1.	Penyiapan data informasi serta laporan pembangunan dilingkungan SETDA			Nanga Bulik		tersusunnya laporan pembangunan dilingkungan SETDA	2 Dokumen	Pelaporan Pembangunan untuk diteruskan ke Propinsi	2 Dokumen	105.000.000	110.250.000	a	
2.	Penetapan Kinerja serta program kegiatan SETDA			Nanga Bulik		Penyusunan Program SETDA	2 Dokumen	Menghasilkan Renstra dan Renja	2 Dokumen	74.000.000	77.700.000	a	
3.	Inventarisasi dan identifikasi hasil Pembangunan			Kabupaten Lamandau		Pendataan Progres Pembangunan Kab. Lamandau	1 Laporan	Pelaporan Pembangunan di 8 Kecamatan	1 Laporan	105.000.000	110.250.000	a	
4.	Pembinaan desa binaan dan PM2L			Kabupaten Lamandau		Terlaksananya Pembinaan desa binaan dan PM2L	1 Tahun	terbinanya desa Binaan dan partisipasi dalam PM2L	1 laporan	52.500.000	55.125.000	a	
5.	Monitoring dan Evaluasi percepatan Pembangunan sanitasi Permukiman ( PPSP )			Kabupaten Lamandau		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi percepatan Pembangunan sanitasi Permukiman ( PPSP )	1 Tahun	Partisipasi dalam Program PPSP Propinsi	1 laporan	63.892.500	67.087.125	a	
6.	Pemanfaatan sistem database dukungan kebijakan nasional ( SDDKN)			Nanga Bulik		Terlaksananya Pemanfaatan sistem database dukungan kebijakan nasional ( SDDKN)	1 Laporan	Laporan SDDKN	1 laporan	99.525.038	104.501.289	a	
<b>XIX.</b>	<b>Program bidang keagamaan</b>	<b>Keagamaan</b>	<b>Terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama</b>		<b>Meningkatnya kualitas bidang keagamaan</b>	<b>100%</b>				<b>700.680.750</b>	<b>733.730.288</b>		

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	JENIS KEGIATAN a/b/c		
					CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN					HASIL KEGIATAN	
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				TOLAK UKUR	TARGET
1.	Bimbingan/Penyuluhan Remaja Masjid dan Gereja			Nanga Bulik			Terlaksananya Bimbingan /Penyuluhan Remaja Masjid dan Gereja	1 Kegiatan	Pembinaan Remaja Masjid dan Gereja	75 orang	57.750.000	60.637.500	a

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	JENIS KEGIATAN a/b/c
					CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET			
	2. Bimbingan Keluarga Sakinah			Nanga Bulik			Terlaksananya Bimbingan Keluarga Sakinah	1 Kegiatan	Keluarga sakinah Kab. Lamandau	60 orang	57.750.000	60.637.500	a
	3. Penyelenggaraan safari Ramadhan			Kabupaten Lamandau			Terlaksananya Penyelenggaraan safari Ramadhan	1 Kegiatan	Kunjungan Safari Ramadhan	9 desa	93.922.500	98.618.625	a
	4. Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji			Nanga Bulik			Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji	1 Kegiatan	Ibadah Haji masyarakat kab. Lamandau	35 orang	260.310.750	271.341.788	a
	5. Penyelenggaraan Kunjungan Natal			Nanga Bulik			Terlaksananya Penyelenggaraan Kunjungan Natal	1 Kegiatan	Kunjungan Natal Pejabat SETDA	5 kecamatan	162.697.500	170.832.375	a
	6. Keluarga Kristen Bahagia			Nanga Bulik			Terlaksananya Keluarga Kristen Bahagia	1 Kegiatan	Keluarga Kristen Bahagia Kab. Lamandau	80 orang	68.250.000	71.662.500	a
<b>XX.</b>	<b>Program bidang kesejahteraan rakyat</b>	<b>Ekonomi</b>	<b>Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin</b>		<b>Jumlah koordinasi Kesra</b>	<b>100%</b>					<b>683.750.000</b>	<b>702.812.500</b>	
	1. Pembinaan mental spiritual/keagamaan			Nanga Bulik			Terlaksananya Pembinaan mental spiritual/keagamaan	1 Kegiatan	Masyarakat Yang berakhlak menurut ajaran agama	75 orang	60.000.000	61.500.000	a
	2. Koordinasi dan Konsultasi bidang Kesra			Luar Daerah			Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi bidang Kesra	1 Tahun	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	10 kali	100.000.000	102.500.000	a
	3. Khitanan massal untuk keluarga tidak mampu			Nanga Bulik			Terlaksananya Khitanan massal untuk keluarga tidak mampu	1 Kegiatan	Bantuan Khitanan bagi masyarakat tidak mampu	75 orang	60.000.000	61.500.000	a
	4. Nikah massal untuk keluarga tidak mampu			Nanga Bulik			Terlaksananya Nikah massal untuk keluarga tidak mampu	1 Kegiatan	Bantuan nikah massal bagi masyarakat tidak mampu	50 pasang	85.000.000	87.125.000	a
	5. Sertifikasi tanah masyarakat			Kabupaten Lamandau			Terlaksananya Hibah tanah masyarakat	5 Percil	Ganti Rugi Tanah masyarakat untuk kepentingan Pemerintah	5 Percil	300.000.000	307.500.000	a
	6. Pemeliharaan dan Operasional Mahasiswa			Yogya,Plk,smg			tersedianya operasional asrama mahasiswa	12 bulan	terpeliharanya asrama mahasiswa	12 bulan	78.750.000	82.687.500	a
<b>XXI.</b>	<b>Program Pelaksanaan Tugas KDH/WKDH</b>	<b>Pemerintahan</b>	<b>Meningkatnya Pelaksanaan Tugas KDH/WKDH</b>		<b>Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar KDH/WKDH</b>	<b>100%</b>					<b>2.064.424.000</b>	<b>2.162.645.200</b>	
	1. Pelayanan Kerumah tanggaan KDH/WKDH			Nanga Bulik			Terlaksananya Pelayanan Kerumah tanggaan KDH/WKDH	1 Tahun	Terpenuhinya Kerumah tanggaan KDH/WKDH	1 Tahun	1.050.000.000	1.102.500.000	a
	2. Pemeliharaan rujab/Barang Inventaris KDH/WKDH			Nanga Bulik			Terlaksananya Pemeliharaan rujab/Barang Inventaris KDH/WKDH	1 Tahun	terpeliharanya kualitas barang invetaris rujab KDH/WKDH	1 Tahun	194.250.000	203.962.500	a
	3. Pemeliharaan Kendaraan Dinas KDH/WKDH			Nanga Bulik			Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas KDH/WKDH	4 unit	Umur Fungsional Meningkat	1 Tahun	147.924.000	155.320.200	a
	4. Pengadaan Barang Inventaris KDH/WKDH			Nanga Bulik			Terlaksananya Pengadaan Barang Inventaris KDH/WKDH	1 Tahun	penunjang Kinerja KDH/WKDH	1 Tahun	204.750.000	214.987.500	a
	5. Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH			Nanga Bulik			Terlaksananya Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH	1 Tahun	penunjang Kinerja KDH/WKDH	1 Tahun	367.500.000	385.875.000	a
	6. Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH			Nanga Bulik			Tersedianya Pakaian Dinas KDH/WKDH	30 stel	penunjang Kinerja KDH/WKDH	1 Tahun	100.000.000	100.000.000	a
<b>XXII.</b>	<b>Program Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan</b>	<b>Pemerintahan</b>	<b>Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah</b>		<b>cakupan referensi dan literatur pemerintah desa</b>	<b>100%</b>					<b>190.000.000</b>	<b>194.500.000</b>	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	JENIS KEGIATAN a/b/c		
					CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN					HASIL KEGIATAN	
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				TOLAK UKUR	TARGET
	1. Pengadaan Buku Saku Pemerintah Desa/Kelurahan			Nanga Bulik			Tersedianya Buku Saku Pemerintah Desa/Kelurahan	90 Buku	Buku Pedoman Pemerintah Desa/Kelurahan	90 Buku	90.000.000	94.500.000	a
	2. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)			Nanga Bulik			terselenggaranya Fasilitasi PATEN	1 keg	Terlaksana PATEN	8 kecamatan	100.000.000	100.000.000	a

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	JENIS KEGIATAN a/b/c
					CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN						
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET			
XXIII.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Birokrasi	Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		cakupan penerapan roadmap reformasi birokrasi	100%					580.000.000	594.500.000	
	1. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal			Nanga Bulik			Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal	1 Dokumen	Peningkatan Pelayanan PNS	1 Dokumen	185.000.000	189.625.000	a
	2. Penyusunan dan sosialisasi IKM			Nanga Bulik			Tersusunnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1 Dokumen	Peningkatan Pelayanan PNS	1 Dokumen	250.000.000	256.250.000	a
	3. Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi			Nanga Bulik			Tersusunnya Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	Terstrukturnya Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	145.000.000	148.625.000	a

Nanga Bulik, Juli 2014

Mengetahui,  
Sekretaris Daerah  
Kabupaten Lamandau,

**Drs. ARIFIN L.P. UMBING, M.A.P**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19581226 198001 1 001